

LAPORAN TAHUNAN 2019



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Brigjen Katamso Nomor 2 PALANGKA RAYA 73112

Telepon (0536) 3229663

Website : www.dislutkan.kalteng.go.id

e-Mail : dislutkan@kalteng.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019** ini dapat disusun.

Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 ini merupakan refleksi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2019, juga digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi sehingga dapat memberi gambaran atas pelaksanaan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan, tingkat pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan, masalah dan kendala yang dihadapi maupun upaya pemecahannya.

Laporan Tahunan ini disusun atas dasar program dan rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019, laporan dari setiap bidang dan unit pelaksana teknis yang ada dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, serta perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang tertuang dalam kegiatan rutin maupun pembangunan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tahunan ini masih banyak kekurangan sehingga kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat dipergunakan untuk penyempurnaan data pada laporan selanjutnya. Kami pun mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan dari semua pihak sehingga Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 ini dapat diselesaikan.

Semoga Laporan Tahunan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Palangka Raya, April 2020

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah,



H. H. DARUANSJAH, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 195607271993031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Keadaan Geografis	2
1.3. Tujuan Penulisan	6
1.4. Sistematika Penyajian	6
II. BIDANG ADMINISTRASI	8
2.1. Organisasi Dinas	8
2.2. Anggaran	32
2.3. Perlengkapan	38
2.4. Kepegawaian	41
III. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	44
3.1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD	44
3.2. Pelaksanaan Kegiatan APBD	49
3.3. Pelaksanaan Kegiatan APBN	92
IV. KERAGAAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN .	103
4.1. Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran	103
4.2. Perikanan Tangkap	118
4.3. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	128
4.4. Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	132
4.5. Unit Pelaksana Teknis	143
V. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH	150
5.1. Permasalahan	150
5.2. Upaya Pemecahan Masalah	150
VI. PENUTUP	152
6.1. Kesimpulan	152
6.2. Saran	152

DAFTAR TABEL

	<u>Tabel</u>	<u>Halaman</u>
1.1.	Data Sungai di Provinsi Kalimantan Tengah	6
2.1.	Anggaran dan Program Belanja Langsung APBD Tahun 2019 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	33
2.2.	Daftar Rincian Realisasi Belanja Tidak Langsung Sampai Akhir Desember 2019 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	34
2.3.	Rincian Dana Dekonsentrasi (DK) APBN Tahun 2019 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	34
2.4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendamping Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019	36
2.5.	Sumber PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019	37
2.6.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)	39
2.7.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)	40
2.8.	Kendaraan Di Atas Air	40
2.9.	Data Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019	43
4.1.	Perkembangan Produksi Budidaya Air Tawar (Budidaya Pembesaran) Kalimantan Tengah Tahun 2018-2019	104
4.2.	Perkembangan Produksi Budidaya kabupaten/Kota Tahun 2019	105
4.3.	Program/Kegiatan Tahun 2019 Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil	109
4.4.	Jumlah Produksi Perairan Laut di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2019	118
4.5.	Jumlah Produksi perairan Umum di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2018-2019	120
4.6.	Jumlah Produksi Pelabuhan di kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah 2019	120

4.7. Produksi Perikanan Perairan Umum Daratan (PUD) Menurut Jenis Ikan di kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2019	121
4.8. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Tahun 2018-2019	124
4.9. Jumlah Armada Penangkapan di Perairan Laut Kalimantan Tengah Tahun 2018-2019	124
4.10. Jumlah Armada Penangkapan di Perairan Umum Kalimantan Tengah Tahun 2018-2019	125
4.11. Jenis Alat Tangkap di Perairan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019	125
4.12. Jenis Alat Tangkap di Perairan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019	125
4.13. Jenis Alat Tangkap di Perairan Laut Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019	126
4.14. Jumlah POKMASWAS di Kalimantan Tengah Tahun 2019	132
4.15. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah	133
4.16. Resiko Bencana dan Bahaya yang terjadi di Pesisir Kalimantan Tengah	134
4.17. Ekosistem Wilayah Pesisir Kalimantan Tengah	136

RINGKASAN

Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah diarahkan untuk peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung pembangunan nasional juga diupayakan untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah, pengembangan wilayah, menciptakan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan pembudidaya/nelayan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan.

Penulisan laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan pelaksanaan pencapaian program/kegiatan kelautan dan perikanan beserta hasilnya, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi selama satu tahun sehingga diharapkan buku laporan ini dapat menjadi bahan informasi rujukan dan umpan balik perencanaan di masa depan sekaligus sebagai pembelajaran kepada masyarakat dengan menyerap dan mempelajari informasi tentang kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya di Kalimantan Tengah.

Anggaran biaya yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 sebesar Rp.42.835.233.024,- yang terdiri dari : APBD sebesar Rp.40.322.635.024,- dan APBN sebesar Rp.2.512.598.000,-.

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam mengelola hasil kelautan dan perikanan yang ada; kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan di sektor kelautan dan perikanan, terutama di Unit Pelaksana Teknis Dinas; masih tradisionalnya sistem dan alat tangkap yang digunakan nelayan dengan usaha berskala kecil; belum optimalnya sarana dan prasarana pengawasan dan biaya operasional penyidik perikanan dalam menangani kasus *illegal fishing*; masih kurangnya modal usaha bagi pembudidaya ikan dan UPI Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terutama bagi pembudidaya ikan maupun UPI skala kecil; dan kurangnya pemahaman pembudidaya ikan tentang cara budidaya ikan yang baik (CBIB).

Dalam mengantisipasi permasalahan tersebut di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan upaya sebagai berikut : peningkatan SDM masyarakat perikanan baik secara kuantitas maupun kualitas; melakukan perbaikan/rehab sarana dan prasarana yang ada dan pembangunan sarana dan prasarana teknis yang baru; memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap; memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam menanggulangi pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan; mencarikan peluang-peluang akses modal usaha bagi pembudidaya ikan dan UPI Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan melakukan pembinaan dan penilaian cara budidaya ikan yang baik (CBIB) kepada pembudidaya ikan.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumberdaya dan kekayaan alam Indonesia yang begitu besar dan melimpah apabila dikelola dengan baik dan benar maka dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan memegang peranan yang cukup penting dalam meningkatkan sektor riil perekonomian Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Tengah pada khususnya. Hal ini didukung dengan begitu besar dan berlimpahnya sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat bila dikelola dengan baik dan benar.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pemerintah baik tingkat pusat hingga daerah harus bersinergi untuk memacu potensi kelautan dan perikanan secara optimal untuk kepentingan masyarakat baik dalam upaya peningkatan pendapatan maupun dalam meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai luhur kearifan lokal sebagai acuan bagi terciptanya pola pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan. Karena dengan kearifan lokal menggambarkan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal yang berinteraksi dengan lingkungannya untuk mempertahankan sumberdaya perairan dengan perlindungan habitat dan populasi ikan sebagai komoditas unggulan.

Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah diarahkan untuk peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung pembangunan nasional juga diupayakan untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah, pengembangan wilayah, menciptakan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan pembudidaya/nelayan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara lestari dan berkelanjutan diperlukan upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan



sumberdaya kelautan dan perikanan melalui *monitoring, controlling* dan *surveillance* (MCS) serta sistem pengawasan masyarakat dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah agar sejalan dengan pembangunan kelautan dan perikanan di pusat dan pembangunan kelautan dan perikanan di daerah maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perbantuan yang diberikan oleh Pemerintah di bidang Kelautan dan Perikanan.

Berkenaan dengan berakhirnya tahun anggaran 2019 maka disusun Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 sebagai sarana informasi serta bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2019 dan diharapkan laporan tahunan ini dapat menjadi bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun berikutnya.

1.2. Keadaan Geografis

1.2.1. Gambaran Umum Fisik Daerah

a. Letak dan Luas Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibukota Palangka Raya terletak di daerah khatulistiwa, yaitu 0°45' Lintang Utara dan 03°30' Lintang Selatan serta 111° - 116° Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai 153.564 Km². Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 13 kabupaten dan 1 kota, dengan 136 kecamatan, 138 kelurahan, serta 1.421 desa. Kondisi alam Kalimantan Tengah saat ini masih lebih banyak kawasan hutan seluas 12.675.364 Ha atau 82,16 %, sedangkan kawasan non kehutanan seluas 2.751.416 Ha atau 17,84 % (berdasarkan hasil penelitian terpadu yang telah melalui uji konsistensi Kementerian Kehutanan *dalam* www.kalteng.go.id).



Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 11 (sebelas) sungai besar dan tidak kurang dari 33 (tiga puluh tiga) sungai kecil/anak sungai. Salah satu sungai yang merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah, yaitu Sungai Barito, memiliki panjang mencapai 900 km dengan kedalaman mencapai 8 m dan dapat dilayari hingga 700 km. Kalimantan Tengah memiliki wilayah lautan yang luas dengan garis pantai sepanjang 750 km di pesisir Laut Jawa.

Secara administratif, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat.

b. Topografi

Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah merupakan daerah dataran rendah dengan topografi yang relatif datar mulai dari wilayah bagian selatan, tengah dari barat hingga ke timur. Pada sektor tengah wilayah Kalimantan Tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi dari landai hingga kemiringan tertentu, dengan pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Sektor utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam, bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke timur. Titik tertinggi wilayah Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang dengan ketinggian hingga 1660 Meter dpl (www.kalteng.go.id).

c. Iklim

Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah yang beriklim tropis karena dilintasi oleh garis khatulistiwa dengan rata-rata mendapat sinaran matahari sekitar 55,02 % per tahun. Iklim daerah Kalimantan Tengah termasuk tropis basah dan dipengaruhi oleh angin barat dan tenggara yang



berganti setiap 6 bulan sekali sehingga mempengaruhi musim hujan dan musim kering. Hal ini menyebabkan kondisi udara relatif cukup panas pada siang hari mencapai 32,8°C, sedangkan pada malam hari suhu udara berkisar 22,5°C. Sementara rata-rata intensitas curah hujan per tahun relatif tinggi yaitu mencapai 224,50 mm. Bagian selatan wilayah Kalimantan Tengah, yang ditandai oleh daerah pantai dan rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan sungai, merupakan wilayah rawan banjir.

1.2.2. Kemampuan Wilayah

Kemampuan wilayah adalah potensi lahan untuk dapat digunakan sebagai tempat usaha pertanian yang didasarkan pada jenis satuan tanahnya. Setiap satuan tanah mempunyai kelas yang berbeda. Semakin tinggi kelasnya, maka makin buruk / rendah kemampuannya dan semakin terbatas pula kemungkinan penggunaannya.

Terkait dengan potensi kesuburan tanah, wilayah-wilayah di Kalimantan Tengah tergolong memiliki potensi kesuburan rendah. Menurut tingkat kesuburannya, tanah di Kalimantan Tengah termasuk dalam kelas IV, V, dan III dengan jenis tanah terdiri dari Organosol, Aluvial, Regosol, PMK, Podsol, Latosol, Litosol, dan Laterit.

1.2.3. Keadaan Umum Kelautan dan Perikanan

Pantai laut di selatan Kalimantan Tengah merangkai 7 (tujuh) kabupaten mulai dari Sukamara di barat hingga Kapuas di timur dengan panjang garis pantai ± 750 km dan potensi laut Kalimantan Tengah sebesar 94.500 km² memiliki berbagai jenis ikan pelagis, udang, rajungan, dan lainnya. Selain itu, Kalimantan Tengah juga memiliki kawasan andalan laut yang kaya akan potensi ikan, yakni perairan laut Kuala Pembuang. Sedangkan perairan umum dengan luas ± 2,29 juta Ha dengan potensi sumberdaya ikannya yang cukup besar perlu pengelolaan dan pemanfaatan secara baik. Pengelolaan dan pemanfaatan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan lingkungannya dan diperlukan sumber daya manusia



(SDM) yang cakap serta didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang cukup dan memadai.

Pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan secara optimal, efisien dan berkelanjutan yang berbasis pada pengendalian penangkapan, pengembangan budidaya dan rehabilitasi ekosistem habitat danau dan pesisir, penataan ruang sesuai karakteristik bio - fisik wilayah dan pembudidayaan kembali berbagai jenis sumberdaya ikan ekonomis penting yang mengalami gejala kepunahan.

Di wilayah Kalimantan Tengah mengalir beberapa sungai besar yang berhulu di sektor utara wilayah. Sungai-sungai utama mempunyai kemiringan yang rendah hingga ke sektor tengah sehingga jangkauan pengaruh pasang air laut relatif jauh khususnya pada musim kemarau. Sebaliknya di musim hujan, air sungai sering meluap ke wilayah pedataran yang dilintasinya. Rawa gambut terdapat hingga ke sektor tengah dan pada bagian yang lebih hilir terdapat rawa pasang surut. Wilayah lebih hulu dialiri anak-anak sungai berpola dendritik dengan kemiringan tinggi bahkan beriam. Kawasan berawa di sektor tengah dan pesisir ini berfungsi sebagai retensi (penyimpan air) saat kelebihan air musim penghujan. Adapun perairan darat di Kalimantan Tengah, yakni sungai, danau, dan rawa dengan luas ± 141.965 Ha, potensial bagi perikanan darat. Dengan sebelas sungai besar dan tidak kurang dari 33 sungai kecil/anak sungai, keberadaannya menjadi salah satu ciri khas Provinsi Kalimantan Tengah. Sungai Barito dengan panjang mencapai 900 km dengan rata-rata kedalaman 8 m merupakan sungai terpanjang dan dapat dilayari hingga 700 km.

Adapun sebelas sungai besar yang terdapat di Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :



Tabel 1.1. Data Sungai di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Nama Sungai	Panjang		Rata-Rata	
		Kilometer (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Kedalaman (Meter)	Lebar (Meter)
1.	Sungai Jelai	200	150	8	150
2.	Sungai Arut	250	190	4	100
3.	Sungai Lamandau	300	250	6	150
4.	Sungai Kumai	175	100	6	250
5.	Sungai Seruyan	350	300	5	250
6.	Sungai Mentaya	400	270	6	350
7.	Sungai Katingan	650	520	6	250
8.	Sungai Sebangau	200	150	5	100
9.	Sungai Kahayan	600	500	7	450
10.	Sungai Kapuas	600	420	6	450
11.	Sungai Barito	900	700	8	500

Sumber : Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2010

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan pelaksanaan pencapaian program/kegiatan kelautan dan perikanan beserta hasilnya, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi selama satu tahun sehingga diharapkan buku laporan ini dapat menjadi bahan informasi rujukan dan umpan balik perencanaan di masa depan sekaligus sebagai pembelajaran kepada masyarakat dengan menyerap dan mempelajari informasi tentang kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya di Kalimantan Tengah.

1.4. Sistematika Penyajian

Laporan Tahunan 2019 ini disusun dengan sistematika penyajian laporan sebagai berikut :

- ❖ **Ringkasan**, pada bagian ini disajikan sasaran dan capaian pelaksanaan kegiatan.



- ❖ **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan latar belakang, keadaan geografis, tujuan penulisan, dan sistematika penyajian.
- ❖ **Bab II Bidang Administrasi**, pada bab ini disajikan tentang organisasi dinas, anggaran, perlengkapan, dan kepegawaian.
- ❖ **Bab III – Bab IV**, yang terdiri dari pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari APBD maupun APBN dan pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2019.
- ❖ **Bab V Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang permasalahan yang dihadapi selama tahun 2019 beserta upaya pemecahan masalahnya.
- ❖ **Bab VI Penutup**, berisi tentang kesimpulan dan saran.
- ❖ **Lampiran**



BAB II BIDANG ADMINISTRASI

2.1. Organisasi Dinas

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah di Bidang Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil;
- b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

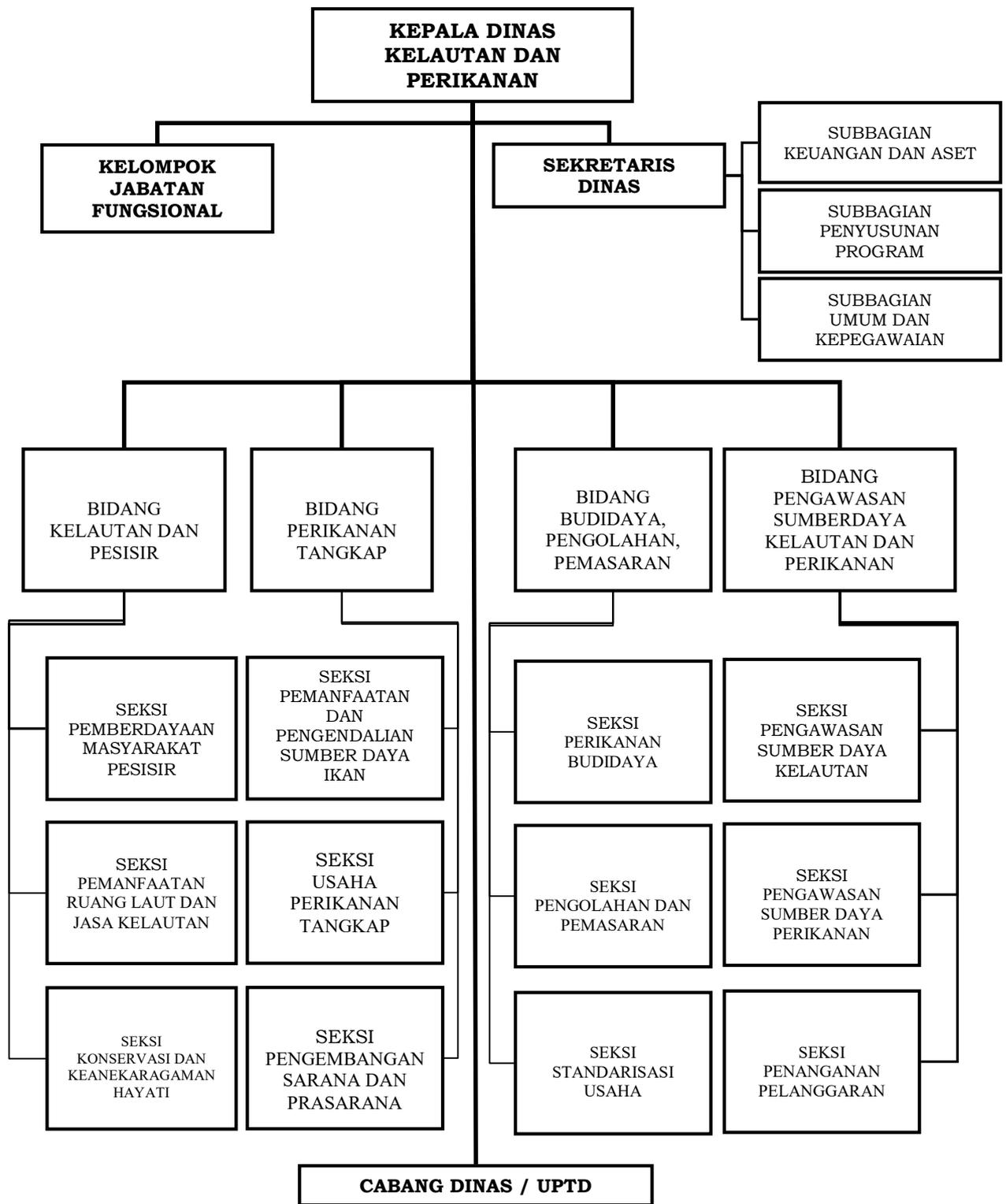


- e. pelaksanaan tugas lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, membawahkan :
 - 1) Seksi Perikanan Budidaya;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran; dan
 - 3) Seksi Standarisasi Usaha.
 2. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
 - 1) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan;
 - 2) Seksi Usaha Perikanan Tangkap; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.
 3. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan;
 - 2) Seksi Pengawasan Perikanan; dan
 - 3) Seksi Penanganan Pelanggaran.
 4. Bidang Kelautan dan Pesisir, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Ruang Laut dan Jasa Kelautan; dan
 - 3) Kepala Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas/cabang dinas.

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada gambar berikut :





Tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

2.1.1. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan jabatannya, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

1. pengumpulan bahan/data perencanaan dan penyusunan program Dinas serta perencanaan anggaran;
2. pengumpulan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas;
3. pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
4. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset;
5. pelaksanaan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
6. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
7. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.



a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. menghimpun bahan-bahan rapat koordinasi program dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
8. menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. menyusun pelaporan pengarusutamaan gender;
10. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Tahunan.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas mengelolakeuangan dan aset. Uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;



2. membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. menyiapkan pengelolaan urusan perbendaharaan dan penata usaha keuangan;
7. menyiapkan bahan rencana kerja inventarisasi dan pengendalian pemanfaatan aset;
8. menyiapkan bahan penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB);
9. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi;
10. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsipengelolaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumahtangga dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan protokol serta pengelolaan informasi dan dokumentasi. Uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaankegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;



3. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. menyiapkan dan mengelola bahan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian urusan ketatausahaan;
7. menyiapkan bahan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kebersihan kantor;
8. melaksanakan administrasi kepegawaian;
9. melaksanakan penatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
10. melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana serta analisis jabatan;
11. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.

2.1.2. Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran

Bidang Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran, standarisasi usaha, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran.

Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. penyusunan program kerja di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran;
2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang budidaya, pengolahan dan pemasaran, standarisasi usaha;



3. pengoordinasian kegiatan di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran;
4. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran sesuai peraturan perundang-undangan;
5. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran sesuai peraturan perundangundangan;
6. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran sesuai peraturan perundang-undangan;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran;
8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran.

a. Kepala Seksi Perikanan Budidaya

Seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugasnya. Uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perikanan Budidaya berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Perikanan Budidaya baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Perikanan Budidaya dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;



5. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Perikanan Budidaya berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;
7. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang perikanan budidaya;
8. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk fungsi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan
9. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perikanan budidaya;
10. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perikanan Budidaya baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.

b. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran

Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran. Uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Pengolahan dan Pemasaran sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan dan Pemasaran baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan dan Pemasaran dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan dan Pemasaran berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran;



7. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengolahan dan pemasaran;
8. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk fungsi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan;
9. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengolahan dan pemasaran;
10. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.

c. Kepala Seksi Standarisasi Usaha

Seksi Standarisasi Usaha mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang standarisasi usaha. Uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Standarisasi Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Standarisasi Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Standarisasi Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Standarisasi Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Standarisasi Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang standarisasi usaha;
7. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang standarisasi usaha;
8. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk fungsi penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil



- Pembudidayaan Ikan, serta tugas lain di bidang standarisasi usaha sesuai peraturan perundang-undangan;
9. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang standarisasi usaha;
 10. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Standarisasi Usaha secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.

2.1.3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya ikan, usaha perikanan tangkap, pengembangan sarana dan prasarana, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perikanan tangkap.

Dalam melaksanakan jabatannya, Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja di bidang perikanan tangkap;
2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya ikan, usahaperikanan tangkap, pengembangan sarana dan prasarana;
3. pengoordinasian kegiatan di bidang perikanan tangkap;
4. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap sesuai peraturan perundangundangan;
5. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan tangkap penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem sesuai peraturan perundang-undangan;
6. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap;
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap.



a. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan.

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya ikan. Uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya ikan;
7. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya ikan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk pengelolaan penangkapan ikan di laut sampai dengan 12(dua belas) mil serta tugas lain di bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya ikan sesuai peraturan perundang-undangan;
9. pengendalian sumber daya ikan sesuai peraturan perundang-undangan;
10. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya ikan;



11. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.

b. Kepala Seksi Usaha Perikanan Tangkap.

Seksi Usaha Perikanan Tangkap mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha perikanan tangkap. Uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Usaha Perikanan Tangkap berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Usaha Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Usaha Perikanan Tangkap baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Usaha Perikanan Tangkap dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Usaha Perikanan Tangkap berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang usaha perikanan tangkap;
7. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan;
8. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang usaha perikanan tangkap;
9. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha Perikanan Tangkap baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.



c. Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.

Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana. Uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana;
7. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan sarana dan prasarana;
8. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk fungsi penerbitan Izin Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi, serta tugas lain di bidang pengembangan sarana dan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan;
9. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sarana dan prasarana;
10. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.



2.1.4 Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengawasan sumber daya kelautan, pengawasan sumber daya perikanan, penanganan pelanggaran, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan jabatannya, Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan, pengawasan sumber daya perikanan, penanganan pelanggaran;
3. pengoordinasian kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
4. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
5. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
6. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

a. Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan.

Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang



pengawasan sumber daya kelautan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugasnya. Uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan;
7. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk fungsi pengawasan perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan penangkapan ikan, penerbitan surat laik operasi untuk kapal perikanan, serta tugas lain di bidang pengawasan sumber daya kelautan sesuai peraturan perundang-undangan;
9. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengawasan sumber daya kelautan;
10. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.



b. Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan sumber daya perikanan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugasnya. Uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan sumber daya perikanan;
7. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengawasan sumber daya perikanan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk fungsi pengawasan pembudidayaan ikan, pengawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta tugas lain dibidang pengawasan sumber daya perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
9. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengawasan sumber daya perikanan;
10. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.



c. Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran

Seksi Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan pelanggaran serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugasnya. Uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Penanganan Pelanggaran berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Penanganan Pelanggaran sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Pelanggaran baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Pelanggaran dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Pelanggaran berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penanganan pelanggaran;
7. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang penanganan pelanggaran;
8. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk fungsi penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan, serta tugas lain di bidang penanganan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan;
9. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penanganan pelanggaran;
10. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Pelanggaran baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.



2.1.5 Bidang Kelautan dan Pesisir

Bidang Kelautan dan Pesisir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut dan jasa kelautan, konservasi dan keanekaragaman hayati serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kelautan dan pesisir.

Dalam melaksanakan jabatannya, Kepala Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja di bidang kelautan dan pesisir;
2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir, pemanfaatan ruang laut dan jasa kelautan, konservasi dan keanekaragaman hayati;
3. pengoordinasian kegiatan di bidang kelautan dan pesisir;
4. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelautan dan pesisir sesuai peraturan perundangundangan;
5. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan pesisir sesuai peraturan perundang-undangan;
6. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kelautan dan pesisir sesuai peraturan perundang-undangan;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kelautan dan pesisir;
8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan pesisir.

a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugasnya. Uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;



2. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. mengumpulkan, mengolah bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir;
7. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir;
8. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk fungsi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, menetapkan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
9. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir;
10. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.

b. Seksi Pemanfaatan Ruang Laut dan Jasa Kelautan.

Seksi Pemanfaatan Ruang Laut dan Jasa Kelautan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan ruang laut dan jasa kelautan serta pelaksanaan kegiatan lain sesuai tugasnya. Uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;



2. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. mengumpulkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati;
7. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati;
8. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum untuk fungsi pencadangan kawasan konservasi, penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, penataan batas kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi, serta tugas lain di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati sesuai peraturan perundangundangan;
9. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati;
10. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.

Sejak tahun 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah mempunyai 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang



ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Keempat UPT yang telah ditetapkan tersebut terdiri dari :

1. UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai Kalimantan Tengah;
2. UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran Kalimantan Tengah;
3. UPT Pelabuhan Perikanan Kumai Kalimantan Tengah; dan
4. UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang Kalimantan Tengah.

Seluruh Unit Pelaksana Teknis tersebut di atas masuk dalam klasifikasi kelas A dan dipimpin oleh Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Susunan organisasi pada keempat UPT tersebut adalah sebagai berikut :

1. UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai Kalimantan Tengah:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Teknik Produksi;
 - d. Seksi Pelayanan Teknik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran Kalimantan Tengah:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Teknik Produksi;
 - d. Seksi Pelayanan Teknik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. UPT Pelabuhan Perikanan Kumai Kalimantan Tengah:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;



- d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang Kalimantan Tengah:
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
 - d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, masing-masing Unit Pelaksana Teknis memiliki tugas, fungsi dan uraian tugas sebagai berikut :

1. UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai

Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai Kalimantan Tengah, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang perikanan budidaya air payau dan laut.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- b. pengoordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2. UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran

Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran Kalimantan Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas



di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- b. pengoordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

3. UPT Pelabuhan Perikanan Kumai

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Kumai Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Pelabuhan Perikanan Kumai Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.



4. UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- b. pelaksanaan koordinasi dan kebijakan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Anggaran

Anggaran biaya yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 sebesar Rp.42.835.233.024,- yang terdiri dari :

- **APBD** terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp.28.293.114.770,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.12.029.520.254,- sehingga dana APBD berjumlah **Rp.40.322.635.024,-**
- **APBN** terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.2.512.598.000,- dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 0,- Sehingga dana APBN berjumlah **Rp.2.512.598.000,-**

Rincian dari anggaran biaya tersebut adalah sebagai berikut :



2.2.1 APBD

a. Belanja Langsung

Pagu Anggaran Belanja Langsung adalah Rp.28.293.114.770,- dengan realisasi Rp. 27.564.448.215,22 atau 97,42% yang terdiri dari Program yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Anggaran dan Program Belanja Langsung APBD Tahun 2019 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Program	Pagu Dana (Rp)	Realisasi		
			Rp	%	Fisik (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.822.910.215,00	1.752.557.276,00	96,14	100
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.848.485.468,00	2.813.468.001,00	98,77	100
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	324.300.000,00	320.407.700,00	98,80	100
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45.000.000,00	37.580.000,00	83,51	100
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	974.794.000,00	966.081.448,00	99,11	100
6.	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	22.000.000,00	19.940.000,00	90,64	100
7.	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	13.335.467.500,00	13.071.377.665,16	98,02	100
8.	Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1.160.810.000,00	1.117.299.253,78	96,25	100
9.	Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir	2.322.944.000,00	2.227.014.600,00	95,87	100
10.	Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	1.041.150.000,00	977.791.358,00	93,91	100
12.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya	4.395.253.587,00	4.260.930.913,28	96,94	100
JUMLAH		28.293.114.770	27.564.448.215,22	97,42	100

Sumber : Subag Penyusunan Program DKP Prov. Kalteng, 2019

b. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai yang digunakan untuk pembayaran Gaji Pokok PNS, Tunjangan, Iuran, dan Tambahan Penghasilan Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2019 Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah disediakan sebesar Rp.12.029.520.254,- dan sampai akhir Desember 2019 telah direalisasikan sebesar Rp.10.008.997.845,- (83,20%).

Rincian realisasi Belanja Tidak Langsung sampai akhir Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.2. Daftar Rincian Realisasi Belanja Tidak Langsung Sampai Akhir Desember 2019 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.137.818.039,00	4.780.908.518,00	93,05
2	Tunjangan Keluarga	470.331.777,00	444.017.994,00	94,41
3	Tunjangan Jabatan	402.517.500,00	343.471.000,00	85,33
4	Tunjangan Fungsional	61.992.000,00	15.960.000,00	25,75
5	Tunjangan Fungsional Umum	182.173.250,00	167.765.000,00	92,09
6	Tunjangan Beras	297.218.922,00	248.979.960,00	83,77
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	39.194.849,00	21.727.370,00	55,43
8	Pembulatan Gaji	388.917,00	68.003,00	17,49
12	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.161.135.000,00	2.994.550.000,00	71,96
13	Tambahan Penghasilan Uang Makan	1.261.750.000,00	991.550.000,00	78,59
14	Insentif Pemungutan Restribusi Daerah	15.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		12.029.520.254,00	10.008.997.845,00	83,20

Sumber : Subag Keuangan dan Aset DKP Prov. Kalteng, 2019

2.2.2 APBN

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 selain berasal dari APBD juga didukung dari APBN. Dana APBN yang disediakan Rp.2.512.598.000,- dan direalisasikan sebesar Rp.2.285.976.744,- atau 90,98 %. Sumber dana berasal dari Dana Dekonsentrasi dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3. Rincian Dana Dekonsentrasi (DK) APBN Tahun 2019 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kegiatan (Satker)	Pagu Dana (Rp)	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	Persentase (%)
1.	Sekretaris Jenderal (01)	822.224.000	804.205.094	97,81
2.	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (03)	490.577.000	405.823.300	82,72
3.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (04)	498.000.000	408.976.600	82,12
4.	Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (05)	352.256.000	351.986.000	99,92
5.	Direktorat Jenderal P2HP (06)	182.041.000	168.681.950	92,66
6.	Direktorat Jenderal KP3K (07)	167.500.000	146.303.800	87,35
TOTAL		2.512.598.000	2.285.976.744	90,98



Kedua sumber anggaran tersebut di atas (APBD dan APBN) saling bersinergi dalam kegiatan untuk mencapai tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan Visi – Misi dapat tercapai.

2.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dalam rangka memacu perkembangan pembangunan khususnya di bidang perikanan di Kabupaten / Kota yang dikategorikan mempunyai kapasitas fiskal rendah maka pemerintah memberikan stimulant. Sejak tahun 2004 Departemen Keuangan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Kabupaten / Kota yang memiliki potensi perikanan prospektif namun memiliki keterbatasan sumber pendanaan pembangunan.

Pada tahun 2019, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp.10.000.521.000,- Dana ini dipergunakan dalam kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Dermaga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kumai (DAK) dan Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil di Kota dan Kabupaten dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.683.619.312,- (96,83 %) dan realisasi fisik sebesar 100,00 %. Uraian kegiatan dan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendamping adalah sebagai berikut :



Tabel 2.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendamping Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019

No	SUB BIDANG / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			MEKNISME PELAKSANAAN						Realisasi			Kodefikasi / Keterangan / Permasalahan		
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik Rp.	swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik			
						Volume	Rp.	Volume	Rp.		Rp.	%	Volume		Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14	
1	PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN TANGKAP				9.261.159.000									9.261.159.000,00	100,00	
a	Rehabilitasi Dermaga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kumai (DAK)	1	Paket	1 Unit PPI	9.261.159.000	-	-	1	9.183.581.015	Termin	9.151.473.258,00	98,82	1,00	9.261.159.000,00	100,00	
2	REHABILITASI UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI) SKALA KECIL				300.000.000									300.000.000,00	100,00	
a	Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil yang berlokasi di kota dan Kabupaten	3	Paket	3 Unit UPI	300.000.000	-	-	3	299.095.453	Termin	299.082.854,00	99,69	3,00	300.000.000,00	100,00	Selesai
3	PENGUNAAN DAK UNTUK PENUNJANG KEGIATAN				439.362.000									439.362.000,00	100,00	
a	Pengadaan Jasa Desain Perencanaan Rehabilitasi Dermaga Pangkalan Pendaratan	1	Paket	1 Unit PPI	100.000.000	-	-	1	94.039.000	Langsung	94.039.000,00	94,04	1,00	100.000.000,00	100,00	Selesai
b	Perencanaan Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil	1	Paket	3 Unit UPI	15.000.000	-	-	1 Paket	14.650.000	Langsung	14.650.000,00	97,67	1 Paket	15.000.000,00	100,00	Selesai
c	Pengawasan Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil	1	Paket	3 Unit UPI	15.000.000	-	-	1 Paket	14.388.000	Langsung	14.388.000,00	95,92	-	15.000.000,00	100,00	Selesai
d	Honorarium, Pelaporan dan monitoring	1	Paket		309.362.000	1	309.362.000	1 Paket		Swakelola	109.986.200,00	35,55	-	309.362.000,00	100,00	
JUMLAH					10.000.521.000		309.362.000		9.605.753.468	-	9.683.619.312,00	96,83		10.000.521.000,00	100,00	



2.2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.352.800.000,- Realisasi PAD tahun 2019 adalah sebesar Rp.124.104.200,- (35,18 %) berasal dari Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5. Sumber PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

No.	Uraian	Target	Realisasi	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Retribusi Jasa Usaha	260.500.000	124.104.200	47,64
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	110.000.000	31.826.200	28,93
	Retribusi Penjualan Produk di Usaha Daerah	150.500.000	92.278.000	61,31
2.	Retribusi Perizinan Tertentu	92.300.000	-	0,00
	Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan Kepada Orang Pribadi	7.800.000	-	0,00
	Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan Kepada Badan	7.500.000	-	0,00
	Retribusi Izin Usaha Penangkapan Ikan	7.500.000	-	0,00
	Retribusi Izin Kapal Pengangkutan Ikan	7.500.000	-	0,00
	Retribusi Izin Penangkapan Ikan Tandon	62.000.000	-	0,00
Total PAD Tahun 2016		352.800.000	124.104.200	35,18

Pada tahun 2019 ini, capaian realisasi PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Tercapainya target PAD ini tentunya merupakan suatu pencapaian yang baik bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran para pelaku usaha perikanan, terutama pelaku usaha perikanan orang pribadi, untuk mengurus izin usaha perikanannya melalui unit layanan penerbitan perizinan perikanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Tengah. Namun dalam hal ini masih terdapat kelemahan terkait izin usaha perikanan yaitu masih terdapat pelaku usaha yang enggan mengurus izin usaha perikanannya. Untuk itu kedepannya strategi dan kebijakan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan PAD sektor kelautan dan perikanan adalah dengan terus meningkatkan program dan kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran, baik yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah



maupun melalui APBN, salah satunya dengan melaksanakan sosialisasi dan gerai terpadu terkait pengurusan izin usaha perikanan dan meningkatkan operasi pengawasan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Juga mengoptimalkan layanan website **geoportal-lautberkah.kalteng.go.id** untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang berkepentingan dalam proses pengurusan perizinan perairan di Provinsi Kalimantan Tengah, baik izin lokasi perairan maupun izin pengelolaan perairan.

2.3 Perlengkapan

2.3.1 Daftar Barang Inventaris Dinas

Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah terdapat barang inventaris dinas yang dipergunakan untuk kepentingan operasional dinas. Sampai dengan tahun 2019, barang inventaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sarana Fisik

1. Gedung Kantor sebanyak 9 Unit, yaitu :
 - a) Kantor PP Kumai
 - b) Kantor PP Seruyan
 - c) Kantor Dislutkan
 - d) Kantor Lap LPPMHP PIL
 - e) PPI Ujung Pandaran
 - f) PPI Selat Jeruju
 - g) PPI Jelai
 - h) PPI Batanjung
 - i) PPI Bahaur
2. Rumah Dinas sebanyak 11 Unit, yaitu :
 - a) Rumah Dinas PP Seruyan 1 Unit
 - b) Rumah Dinas PP Kumai 6 Unit
 - c) Rumah Dinas Kepala Dinas Dislutkan 1 Unit
 - d) Rumah Dinas Kepala LPPMHP PIL 1 Unit
 - e) Rumah Dinas PPI Selat Jeruju 1 Unit
 - f) Rumah Dinas PPI Batanjung 1 Unit
3. Tanah sebanyak 17 Buah



4. Pos Pengawasan 8 Unit, yaitu :
- a) Pos Pengawasan
 - b) Bangunan Pos
 - c) Gedung Pos Pengawasan PPI Batanjung
 - d) Pos Pengamanan PP Kumai
 - e) Pembangunan Pos Jaga di TPI
 - f) Pos Jaga PPI Bahaur
 - g) Rumah Pos Jaga
 - h) Pos Pengawasan hibah APBN Lingkup Dislutkan

b. Sarana Mobilitas

Sarana mobilitas yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

- Kendaraan bermotor roda 4 (empat) = 8 Unit
- Kondaraan bermotor roda 2 (dua) = 16 Unit
- Kendaraan di atas air = 15 Unit

Uraian sarana mobilitas ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6. Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)

No.	Merk/Tipe Kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Pembelian	Asal Usul Cara Perolehan	Keterangan / Kondisi
1	Mobil Pic Up	KH8388AB	2002	Pembelian	Rusak Berat
2	Mobil Toyota Pick Up	KH8302E	2002	Pembelian	Rusak Berat
3	Mobil Toyota Kijang	KH160AU/ KH1043TU	2002	Pembelian	Baik
4	Mobil Toyota New Avanza	KH1283AU	2015	Mutasi dari Ro. Umum	BAIK
5	Mobil Pic Up Colorado	KH 8685AW	2015	Pembelian	Baik
6	Toyota Kijang Innova Venturer	KH 54	2018	Pembelian	Baik
7	Mobil Kijang Inova	KH 1118AU	2019	Hibah APBN	Baik
8	Mobil Suzuki APV	KH1091AU	2019	Hibah APBN	Baik



Tabel 2.7. Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)

No.	Merk/Tipe Kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Pembelian	Asal Usul Cara Perolehan	Keterangan / Kondisi
1	Honda Karisma	KH2189AY	2004	Pembelian	Baik
2	Suzuki Thunder	KH4179AY	2007	Pembelian	Baik
3	Suzuki Thunder	KH4180AY	2007	Pembelian	Rusak Berat
4	Suzuki Thunder	KH4181AY	2007	Pembelian	Baik
5	Suzuki FL125 RCD	KH5199AY	2014	Pembelian	Baik
6	Honda Supra X	KH5794AY	2014	Pembelian	Baik
7	Honda Supra X	KH5866AY	2014	Pembelian	Baik
8	Honda Supra X	KH5863AY	2014	Pembelian	Baik
9	Honda Supra X	KH5785AY	2014	Pembelian	Baik
10	Honda Supra X	KH5861AY	2014	Pembelian	Baik
11	VIAR	KH3382TY	2018	Pembelian	Baik
12	VIAR	KH3384TY	2018	Pembelian	Baik
13	Honda Kharisma	KH5360AH	2019	HIBAH APBN	Kurang Baik
14	Honda Kharisma	KH2216AY	2019	HIBAH APBN	Kurang Baik
15	Honda Kharisma	KH2217AY	2019	HIBAH APBN	Kurang Baik
16	Honda Kharisma	KH2218AY Ex KH5354AH	2019	HIBAH APBN	Kurang Baik

Tabel 2.8. Kendaraan Di Atas Air

No.	Merk/Tipe Kendaraan	Jumlah (Unit)	Tahun Pembelian	Asal Usul Cara Perolehan	Keterangan/ Kondisi
1	Kapal Motor	1	2008	Pembelian	TDK
2	Kapal Motor	1	2008	Pembelian	TDK
3	Kapal Motor	1	2008	Pembelian	TDK
4	SpeedBoat	1	2006	Pembelian	TDK
5	SpeedBoat	1	2007	Pembelian	TDK
6	SpeedBoat	1	2007	Pembelian	TDK
7	SpeedBoat	1	2008	Pembelian	TDK
8	SpeedBoat	1	2008	Pembelian	TDK
9	SpeedBoat	1	2008	Pembelian	TDK
10	SpeedBoat	1	2008	Pembelian	TDK
11	Kelotok	1	2007	Pembelian	TDK
12	Kelotok	1	2007	Pembelian	TDK
13	Kelotok	1	2008	Pembelian	TDK
14	Kelotok	1	2008	Pembelian	TDK
15	Kelotok	1	2008	Pembelian	TDK

*Keterangan : TDK = Tidak Diketahui Keberadaannya



2.4 Kepegawaian

2.4.1 Jumlah Pegawai

Pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sampai akhir tahun 2019 berjumlah 153 orang, PNS berjumlah 99 orang dan Tenaga Kontrak berjumlah 54 orang, yang dapat dibedakan berdasarkan :

1. Status Kepegawaian :
 - a. PNS
 - Golongan I = 0 orang
 - Golongan II = 14 orang
 - Golongan III = 68 orang
 - Golongan IV = 17 orang
 - b. CPNS = 0 orang
 - c. Tenaga Kontrak = 54 orang
2. Jenis Kelamin (PNS + CPNS + Tekon) :
 - Laki-Laki = 97 orang
 - Perempuan = 56 orang
3. Jenjang Karier (PNS + CPNS) :
 - a. Eselon II A = 1 orang
 - b. Eselon III A = 5 orang
 - c. Eselon III B = 4 orang
 - d. Eselon IV A = 26 orang
 - e. Fungsional = 2 orang
 - f. Non Struktural/Fungsional = 61 orang
4. Pendidikan Terakhir (PNS + CPNS + Tekon):
 - SD = 3 orang
 - SLTP = 3 orang
 - SLTA = 42 orang
 - DIII = 5 orang
 - DIV / S1 = 74 orang
 - S2 = 26 orang
 - S3 = 0 orang



2.4.2 Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala

Pada tahun 2019, pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapat kenaikan pangkat berjumlah 20 orang. Sedangkan untuk pegawai yang mendapatkan kenaikan gaji berkala sebanyak 47 orang.

2.4.3 Pensiunan dan Pengangkatan Pegawai

Pada tahun 2019, terdapat 2 orang pegawai yang Pensiun dan terdapat pengangkatan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2 orang.

2.4.4 Pelatihan Pegawai

a. Pelatihan Penjurangan Karir

Pada tahun 2019, tidak ada pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapatkan pelatihan penjurangan karir, baik itu Spati/Spamen/Sespanas, Sespa/Spamen/PIM Tk. II, Sepadya/Spama/PIM Tk. III, maupun Sepada/Adum/PIM Tk. IV.

b. Pengembangan SDM

Pada program pengembangan SDM, terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu Tugas Belajar dan Ijin Belajar. Pada tahun 2019, tidak ada pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapat Tugas Belajar sedangkan untuk Ijin Belajar sebanyak 9 orang terdiri dari 3 orang ke jenjang Strata-2 dan 6 orang ke jenjang Strata-1.

Tabel 2. 9. Data Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

No	Sekretariat / Bidang	Tenaga Kontrak	CPNS				PNS				Jenis Kelamin		Pendidikan Terakhir							
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	LK	PR	SD	SLTP	SLTA	DIII	DIV/S1	S2	S3	
I	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan								1			1						1		
II	Sekretariat	11						7	17	3		20	18		1	16	2	13	6	
	- Sekretaris									1			1						1	
	- Subag Penyusunan Program	3							4	1		3	5					6	2	
	- Subag Umum dan Kepegawaian	7						6	4	1		14	4		1	13	1	2	1	
	- Subag Keuangan dan Aset	1						1	9			3	8			3	1	5	2	
III	Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)								8	2		6	4				1	7	2	
IV	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran	3						3	10	3		11	8			3	1	12	3	
V	Bidang Kelautan dan Pesisir							1	9	2		6	6					9	3	
VI	Bidang Perikanan Tangkap	8						1	9	2		14	6			6	1	10	3	
VII	UPT. Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai	6							4	1		9	2		1	2		7	1	
VIII	UPT. Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran	5							6	1		9	3		1	3		7	1	
IX	UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai	11							4	1		11	5	1		6		6	3	
X	UPT. Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang	10							3	1		10	4	2		6		3	3	
Jumlah Pegawai		54	0	0	0	0	0	12	70	17		97	56	3	3	42	5	74	26	0
Jumlah Keseluruhan Pegawai		54	0				99				153		153							

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DKP Prov. Kalteng, 2019



BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui dana APBD tahun 2019 khususnya Belanja Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp 28.293.114.770,- dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 27.564.448.215,22 dengan rincian program dan kegiatan yang menggunakan Belanja Langsung adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp 1.822.910.215,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.229.731.000	1.822.910.215	1.752.557.076	96,14	100
1	Penyediaan jasa surat menyurat	6.700.000	8.700.000	6.590.000	75,75	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	329.000.000	420.050.000	397.718.382	94,68	100
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	7.300.000	7.300.000	7.295.000	99,93	100
5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	10.000.000	10.000.000	4.762.632	47,63	100
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	80.000.000	106.000.000	99.119.576	93,51	100
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	286.000.000	487.572.500	485.640.700	99,60	100
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	69.943.000	69.943.000	69.321.000	99,11	100
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	100
10	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000	50.000.000	49.881.700	99,76	100
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.988.000	13.988.000	13.987.900	100,00	100
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.800.000	80.880.000	80.383.000	99,39	100
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	27.000.000	27.000.000	26.496.000	98,13	100
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	95.000.000	95.000.000	75.200.000	79,16	100
17	Penyediaan makanan dan minuman	22.000.000	22.000.000	21.990.000	99,95	100
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	119.000.000	219.000.000	211.425.486	96,54	100
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100.000.000	199.476.715	196.745.700	98,63	100



II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp 2.848.485.468,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%
2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	907.385.468	2.848.485.468	2.813.468.001	98,77	100
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	76.000.000	550.000.000	545.890.000	99,25	100
10	Pengadaan Meubelair	110.000.000	565.100.000	547.777.601	96,93	100
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.500.000	252.000.000	250.545.000	99,42	100
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00	100
30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100,00	100
42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	410.000.000	1.114.500.000	1.105.761.850	99,22	100
45	Pengadaan komputer	22.000.000	82.000.000	81.759.500	99,71	100
194	Penataan Taman dan Kebersihan Serta Kebun Hortikultura	255.385.468	255.385.468	252.234.050	98,77	100

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp 324.300.000,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	270.000.000	324.300.000	320.407.700	98,80	100
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	120.000.000	120.000.000	118.894.700	99,08	100
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	70.000.000	124.300.000	122.759.000	98,76	100
9	Pengadaan Pakaian Batik Tradisional	80.000.000	80.000.000	78.754.000	98,44	100

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp 45.000.000,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45.000.000	45.000.000	37.580.000	83,51	100
3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	45.000.000	45.000.000	37.580.000	83,51	100



**LAPORAN TAHUNAN 2019
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp 974.794.000,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	894.794.000	974.794.000	966.081.448	99,11	100
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2.700.000	2.700.000	2.655.000	98,33	100
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.500.000	4.500.000	4.463.000	99,18	100
6	Penyusunan RKA-SKPD	137.682.000	143.655.600	139.190.100	96,89	100
11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	228.712.000	258.712.000	257.016.248	99,34	100
14	Penyusunan LAKIP	35.000.000	33.500.000	33.500.000	100,00	100
15	Penyusunan renja SKPD	137.000.000	133.526.400	133.386.400	99,90	100
29	Penyusunan Laporan Tahunan Dinas	34.000.000	33.000.000	31.500.000	95,45	100
35	Penyusunan LKPJ dan LPPD	34.000.000	34.000.000	34.000.000	100,00	100
77	Penyusunan Laporan Data Statistik Perikanan	281.200.000	331.200.000	330.370.700	99,75	100

VI. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah sebesar Rp 22.000.000,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%
8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	22.000.000	22.000.000	19.940.000	90,64	100
1	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	22.000.000	22.000.000	19.940.000	90,64	100

VII. Program Pengembangan Perikanan Tangkap sebesar Rp 13.335.467.500,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%
21	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	14.035.467.500	13.335.467.500	13.071.377.665	98,02	100
1	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	190.000.000	190.000.000	177.541.430	93,44	100
32	Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Nelayan Perairan Laut	500.000.000	500.000.000	495.485.700	99,10	100
34	Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Ikan Perairan Umum Daratan	1.600.000.000	792.430.000	759.568.000	95,85	100
37	Monitoring Evaluasi Sumber Daya Ikan, Perairan dan Kelembagaan Pengelolaan SDI	70.000.000	70.000.000	69.852.000	99,79	100
39	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Perairan Umum Daratan dan Laut	100.000.000	55.013.000	45.583.000	82,86	100
42	Pembinaan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap	224.000.000	224.000.000	222.223.400	99,21	100
45	Pengembangan Habitat dan Perlindungan Sumberdaya Ikan	180.000.000	180.000.000	166.707.000	92,62	100
47	Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsi Pelabuhan Perikanan (DAK)	9.641.826.000	9.641.826.000	9.514.611.858,16	98,68	100
48	Peningkatan Layanan Pelabuhan Perikanan Kumai	573.869.500	589.469.500	581.581.400	98,66	100
49	Peningkatan Layanan Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang	633.404.000	733.404.000	723.259.877	98,62	100
50	Peningkatan Tata Kelola Pelabuhan Perikanan	322.368.000	359.325.000	314.964.000	87,65	100



LAPORAN TAHUNAN 2019
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

VIII. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan sebesar Rp 1.160.810.000,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%
25	Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan	1.010.695.000	1.160.810.000	1.117.299.254	96,25	100
3	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	160.000.000	248.115.000	246.805.000	99,47	100
9	Pengembangan Usaha Pengolahan Perikanan Skala Kecil	423.695.000	423.695.000	411.667.853,78	97,16	100
13	Pameran dan promosi produk perikanan	227.000.000	262.000.000	252.187.400	96,25	100
25	Operasi Pasar	100.000.000	127.000.000	115.059.500	90,60	100
27	Sertifikasi Kelayakan Pengolahan Bagi Unit Pengolahan Ikan	100.000.000	100.000.000	91.579.500	91,58	100

IX. Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir sebesar Rp 2.322.944.000,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%
26	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir	3.965.000.000	2.322.944.000	2.227.014.600	95,87	100
13	Penataan Kawasan Wilayah Pesisir	246.000.000	246.000.000	244.375.800	99,34	100
18	Penyusunan Dokumen Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan laut	2.920.000.000	1.302.796.000	1.227.922.200	94,25	100
19	Rehabilitasi dan Ekstensifikasi Terumbu Karang	97.000.000	97.000.000	95.722.800	98,68	100
21	Inventarisasi dan Identifikasi Kawasan Konservasi	20.000.000	20.000.000	18.710.000	93,55	100
22	Adopsi Teknologi dan Pembelajaran ke Lokasi Kawasan Konservasi Perairan Laut	100.000.000	84.436.200	84.434.700	100,00	100
23	Pembinaan Kelompok Pengelola Kawasan Konservasi	22.000.000	37.563.800	34.831.000	92,72	100
24	Identifikasi/Inventarisasi Potensi Limbah Hasil Perikanan Yang Dapat Dimanfaatkan Ulang di Kawasan Pesisir	100.000.000	100.000.000	96.986.800	96,99	100
25	Adopsi Teknologi dan Pembelajaran ke Pengrajin/Komunitas Pengolah Limbah Hasil Perikanan	70.000.000	64.316.400	64.316.400	100,00	100
27	Pembinaan Kelompok Wanita Pengolah Limbah Hasil Perikanan Di Kawasan Wisata Ujung Pandaran	34.000.000	33.640.000	33.640.000	100,00	100
28	Koordinasi/Evaluasi/Pembinaan Terkait Pemanfaatan Ruang Laut dan Jasa Kelautan Dengan Stakeholder Terkait di Wilayah Pesisir	80.000.000	86.043.600	77.813.800	90,44	100
29	Gerakan Bersih Pantai dan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir	76.000.000	76.000.000	75.200.000	98,95	100
30	Penyusunan Rencana Pengelolaan Wisata Mangrove	200.000.000	175.148.000	173.061.100	98,81	100

X. Program Pengawasan Pemanfaatan SDKP sebesar Rp 1.041.150.000,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%
27	Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	1.041.150.000	1.041.150.000	977.791.358	93,91	100
6	Peningkatan Upaya Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan	400.000.000	400.000.000	362.131.000	90,53	100
7	Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan	102.150.000	102.150.000	89.300.000	87,42	100
9	Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak	114.000.000	114.000.000	113.455.435	99,52	100
10	Peningkatan Sarana Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	100.000.000	100.000.000	92.570.321	92,57	100
11	Pemantauan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan	220.000.000	220.000.000	215.334.602	97,88	100
13	Pembentukan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	105.000.000	105.000.000	105.000.000	100,00	100



XI. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya sebesar Rp 4.395.253.587,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%
29	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya	7.126.842.587	4.395.253.587	4.260.930.913	96,94	100
8	Gerakan Pakan Mandiri	3.502.992.587	169.936.400	168.487.000	99,15	100
16	Pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil	200.000.000	300.057.187	284.688.500	94,88	100
35	Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Operasional UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran	645.925.000	662.925.000	639.434.200	96,46	100
36	Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Operasional UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai	645.925.000	645.925.000	629.449.929	97,45	100
38	Pendataan dan Pembinaan Kelompok Pembudidaya Di Kawasan Pesisir Dan Laut	50.000.000	50.000.000	47.343.000	94,69	100
39	Gerakan Pakan Mandiri Di Kawasan Pesisir Laut	66.000.000	66.000.000	62.740.000	95,06	100
40	Pembinaan dan Pendampingan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) Di Kawasan Pesisir Dan Laut	90.000.000	90.000.000	83.570.000	92,86	100
41	Pengumpulan dan Pengelolaan Data Sasaran dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya	50.000.000	50.000.000	49.128.000	98,26	100
42	Pengembangan Budidaya Di Kawasan Pesisir Dan Laut	700.000.000	700.000.000	685.804.000	97,97	100
43	Koordinasi dan Monitoring Ke UPTD/UPR/Pembudidaya Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Di Kawasan Pesisir Laut	100.000.000	100.000.000	96.401.000	96,40	100
44	Pengembangan Perikanan Budidaya	750.000.000	1.234.410.000	1.225.101.984,28	99,25	100
45	Pendampingan dan Monev Bantuan Pemerintah	55.000.000	55.000.000	51.699.000	94,00	100
46	Pembinaan dan Bimbingan Teknis dan Pembekalan Kepada Kelompok Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI)	66.000.000	66.000.000	66.000.000	100,00	100
47	Pembinaan UPR/UPTD BBI Dalam Rangka Sertifikasi Cara Perbenihan Ikan Yang Baik (CBIB)	110.000.000	110.000.000	84.195.900	76,54	100
48	Sosialisasi dan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)	55.000.000	55.000.000	49.118.400	89,31	100
49	Pembinaan Perijinan Kapal Pengangkut Ikan Hasil Budidaya	40.000.000	40.000.000	37.770.000	94,43	100

Program dan kegiatan tersebut di atas dilaksanakan secara bersinergi satu dengan yang lain sehingga dapat saling mendukung dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan dukungan dari sumberdaya manusia aparatur, peran serta masyarakat maupun pihak-pihak terkait, terutama kemampuan pembiayaan guna kelancaran pelaksanaan program-program tersebut.



3.2. Pelaksanaan Kegiatan APBD

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri dari 16 kegiatan yang dilaksanakan secara rutin oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, anggaran kegiatan pada program ini telah terealisasi sebesar 96,14 % dengan realisasi fisik sebesar 100,00 %. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada program ini adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 8.700.000,-	Rp. 6.590.000,-	75,75 %
Keluaran	Jumlah Layanan Jasa surat menyurat dan materai	1500 surat	1500 surat	100 %
Hasil	Meningkatnya pelayanan jasa surat menyurat Dinas Kelautan dan Perikanan	1500 surat	1500 surat	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 420.050.000,-	Rp. 397.718.382,-	94,68 %
Keluaran	Jumlah layanan jasa telepon, listrik dan air bersih	12 bulan; 1 Paket	12 bulan; 1 Paket	100 %
Hasil	Meningkatnya pelayanan jasa layanan telepon, listrik dan air kantor	12 bulan; 1 Paket	12 bulan; 1 Paket	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 7.300.000,-	Rp. 7.295.000,-	99,93 %
Keluaran	Jumlah layanan jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	15 unit	15 unit	100 %
Hasil	Terjaganya peralatan dan perlengkapan kantor	15 unit	15 unit	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 10.000.000,-	Rp. 4.762.832,-	47,63 %
Keluaran	Jumlah polis asuransi gedung kantor dinas	2 polis	2 polis	100 %
Hasil	Asuransi gedung kantor dinas	2 polis	2 polis	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 106.000.000,-	Rp. 99.119.576,-	93,51 %
Keluaran	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan perizinannya (R2 dan R4)	15 unit	15 unit	100 %
Hasil	Terpeliharanya kendaraan operasional dinas R2 dan R4	15 unit	15 unit	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 487.572.500,-	Rp. 485.640.700,-	99,60 %
Keluaran	Jumlah layanan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100 %
Hasil	Meningkatnya pelayanan jasa administrasi keuangan dinas	12 Bulan	12 Bulan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 69.943.000,-	Rp. 69.321.000,-	99,11 %
Keluaran	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan LPPMHP	12 Bulan	12 Bulan	100 %
Hasil	Meningkatnya kebersihan kantor dinas dan LPPMHP	12 Bulan	12 Bulan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

8. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	100 %
Keluaran	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	15 unit	15 unit	100 %
Hasil	Terpeliharanya peralatan kerja kantor	15 unit	15 unit	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



9. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 49.881.700,-	99,76 %
Keluaran	Jumlah alat tulis kantor untuk keperluan dinas	12 Bulan	12 Bulan	100 %
Hasil	Tersedianya alat tulis kantor untuk keperluan dinas	12 Bulan	12 Bulan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 13.988.000,-	Rp. 13.987.900,-	100 %
Keluaran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100 %
Hasil	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 80.880.000	Rp. 80.383.000	99,39 %
Keluaran	Jumlah komponen instalasi penerangan yang tersedia	8 Jenis	8 Jenis	100 %
Hasil	Tersedianya Komponen Listrik Kantor Dinas	8 Jenis	8 Jenis	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 27.000.000	Rp. 26.496.000	98,13 %
Keluaran	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor	7 Unit	7 Unit	100 %
Hasil	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	7 Unit	7 Unit	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 95.000.000	Rp. 75.200.000	79,16 %
Keluaran	Jumlah bahan bacaan surat kaar media cetak local	24 media bacaan	24 media bacaan	100 %
Hasil	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang undangan	24 media bacaan	24 media bacaan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



14. Penyediaan Makanan dan Minuman

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 22.000.000	Rp. 21.990.000	96,54 %
Keluaran	Tersedianya Minuman dan Snack Tamu	1500 Porsi	1500 Porsi	100 %
Hasil	Meningkatnya pelayanan terhadap tamu dinas	1500 Porsi	1500 Porsi	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

15. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 219.000.000	Rp. 211.425.486	96,54 %
Keluaran	Jumlah Rapat koordinasi, konsultasi luar daerah yang diikuti	13 Orang Kali	13 Orang Kali	100 %
Hasil	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan kegiatan ke luar daerah	13 Orang Kali	13 Orang Kali	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

16. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 199.476.715	Rp. 196.745.700	98,63 %
Keluaran	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	16 Orang Kali	16 Orang Kali	100 %
Hasil	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan kegiatan ke dalam daerah	16 Orang Kali	16 Orang Kali	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, anggaran kegiatan pada program ini sampai akhir Desember 2019 telah terealisasi sebesar 98,77 % dengan realisasi fisik sebesar 100,00 %. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada program ini sampai dengan akhir Desember 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 550.000.000	Rp. 545.890.000	100 %
Keluaran	Jumlah perlengkapan kantor ; spanduk, bendera, umbul umbul yang tersedia	13 jenis	13 jenis	100 %
Hasil	Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	13 jenis	13 jenis	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

2. Pengadaan Meubelair

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 565.100.000	Rp. 547.777.601	96,91 %
Keluaran	Jumlah meubelair kebutuhan kantor dan Rumah	12 Buah	12 Buah	100 %
Hasil	Jumlah meubelair kebutuhan kantor dan Rumah	12 Buah	12 Buah	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 252.000.000	Rp. 250.545.000	99,42 %
Keluaran	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Gedung	1 Gedung	100 %
Hasil	Terjaga dan terawatnya gedung kantor	1 Gedung	1 Gedung	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	100 %
Keluaran	Presentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	16 Unit	16 Unit	100 %
Hasil	Terjaga dan terawatnya perlengkapan gedung kantor	16 Unit	16 Unit	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	100 %
Keluaran	Presentase peralatan kantor yang terpelihara	3 Unit	3 Unit	100 %
Hasil	Terjaga dan terawatnya peralatan kantor	3 Unit	3 Unit	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 1.114.500.000	Rp. 1.105.761.850	99,22 %
Keluaran	Presentase peralatan gedung kantor yang terpelihara	1 Paket	1 Paket	100 %
Hasil	Terjaga dan terawatnya peralatan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

7. Pengadaan Komputer

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 82.000.000	Rp. 81.759.500	99,71 %
Keluaran	Jumlah Laptop yang tersedia	1 Unit	1 Unit	100 %
Hasil	Meningkatnya Peralatan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Unit	1 Unit	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



8. Penataan Taman dan Keberhasilan Serta Kebun Hortikultura

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 255.385.468	Rp. 252.234.050	98,77 %
Keluaran	Terlaksananya Penataan Taman, Ruang Merokok, dan Kebersihan Serta Kebun Hortikultura	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Hasil	Terlaksananya Penataan Taman, Ruang Merokok, dan Kebersihan Serta Kebun Hortikultura	1 Tahun	1 Tahun	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, anggaran kegiatan pada program ini sampai akhir Desember 2019 telah terealisasi sebesar 98,80 % dengan realisasi fisik sebesar 100,00 %. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada program ini sampai dengan akhir Desember 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 120.000.000	Rp. 118.894.700	99,08 %
Keluaran	Jumlah pakaian dinas harian ASN yang tersedia	160 stel	160 stel	100 %
Hasil	Meningkatnya kinerja pegawai	160 stel	160 stel	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 124.300.000	Rp. 122.759.000	98,76 %
Keluaran	Jumlah pakaian olah raga aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	160 stel	160 stel	100 %
Hasil	Keseragaman pakaian Olah raga Bagi Aparatur Sipi Negara	160 stel	160 stel	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

3. Pengadaan Pakaian Batik Tradisional

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 80.000.000	Rp. 78.754.000	98,44 %
Keluaran	Jumlah pakaian Batik Tradisional yang diadakan untuk aparatur sipil negara Dinas Kelautan dan Perikanan	160 stel	160 stel	100 %
Hasil	Keseragaman Pakaian Dinas Aparatur Dislutkan	160 stel	160 stel	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, sampaiakhir Desember 2019 program ini telah terealisasi secara keuangan sebesar 83,51 % dan realisasi fisiknya sebesar 100,00 %. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada program ini sampai dengan akhir Desember 2019 adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 45.000.000	Rp. 37.580.000	83,51 %
Keluaran	Jumlah bimtek yang diikuti	10 Orang	10 Orang	100 %
Hasil	Meningkatnya SDM, baik teknis maupun manajemen	10 Orang	10 Orang	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini terdiri dari 9 (Sembilan) kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, sampai akhir Desember 2019 program ini telah terealisasi secara keuangan sebesar 99,11 % dan realisasi fisiknya sebesar 100,00 % dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 2.700.000	Rp.2.655.000	98,33 %
Keluaran	Jumlah laporan prognosis/semester I realisasi keuangan yang tersusun	12 laporan	12 laporan	100 %
Hasil	Bahan evaluasi pelaksanaan keuangan tahun berikutnya	12 laporan	12 laporan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 4.500.000	Rp. 4.463.000	99,18 %
Keluaran	Jumlah laporan keuang akhir tahun SKPD yang tersusun	1 laporan	1 laporan	100 %
Hasil	Bahan evaluasi pelaksanaan keuangan tahun berikutnya	1 laporan	1 laporan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

3. Penyusunan RKA - SKPD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 143.655.600	Rp. 139.190.100	96,89 %
Keluaran	Jumlah dokumen RKA dan DPA yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
Hasil	Tersediannya dokumen RKA dan DPA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 258.712.000	Rp. 257.016.248	99,34 %
Keluaran	Terlaksananya Monev Program dan Kegiatan ke Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Hasil	Tersediannya pelaporan Dislutkan yang akuntable dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

5. Penyusunan LAKIP

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 33.500.000	Rp. 33.500.000	100 %
Keluaran	Jumlah Lakip Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Hasil	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



6. Penyusunan Renja SKPD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 133.526.400	Rp. 133.386.400	99,90 %
Keluaran	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Laporan	2 Laporan	100 %
Hasil	Tersediannya Bahan dalam penyusunan RKA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Laporan	2 Laporan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

7. Penyusunan Laporan Tahunan Dinas

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 33.000.000	Rp. 31.500.000	100 %
Keluaran	Jumlah Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Hasil	Tersusunnya Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



8. Penyusunan LKPJ dan LPPD

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 34.000.000	Rp. 34.000.000	100 %
Keluaran	Tersusunnya laporan LKPJ dan LPPD Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Laporan	2 Laporan	100 %
Hasil	Tersedianya data LKPJ dan LPPD Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Laporan	2 Laporan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

9. Penyusunan Laporan Data Statistik Perikanan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 331.200.000	Rp. 330.370.700	99,75 %
Keluaran	Terfasilitasi kegiatan penyusunan informasi dan data statistic	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Hasil	Tersediannya dokumen data statistik yang akuntabel	1 dokumen	1 dokumen	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



F. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset / Barang Daerah

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Pengelolaan Inventaris Barang Daerah dengan tujuan agar laporan database aset dinas tersusun. Sampai dengan akhir Desember 2019, kegiatan ini telah terealisasi secara keuangan sebesar 90,64 % dan fisik sebesar 100,00 %.

1. Pengelolaan Inventaris Barang Daerah

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 22.000.000	Rp. 19.940.000	90,64 %
Keluaran	Jumlah data aset dinas kelautan dan perikanan	1 laporan	1 laporan	100 %
Hasil	Terdatanya aset Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	1 dokumen	1 dokumen	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

G. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap

Program ini terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, anggaran kegiatan pada program ini sampai akhir Desember 2019 telah terealisasi sebesar 99,10 % dengan realisasi fisik sebesar 100,00 %. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada program ini sampai dengan akhir Desember 2019 adalah sebagai berikut :



1. Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 190.000.000	Rp. 177.541.430	93,44 %
Keluaran	Terlaksananya pendampingan asuransi nelayan, sosialisasi asuransi mandiri, pendampingan dan sosialisasi SeHAT Nelayan	7 Lokasi	7 Lokasi	100 %
Hasil	Tercapainya pendampingan asuransi nelayan, sosialisasi asuransi mandiri, pendampingan dan sosialisasi SeHAT Nelayan	7 Lokasi	7 Lokasi	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

2. Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Nelayan Perairan Laut

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 500.000.000	Rp. 495.485.700	99,10 %
Keluaran	Terlaksananya Sarpas penangkapan ikan yang dilakukan nelayan di perairan laut	75 Unit, 1 Paket	75 Unit, 1 Paket	100 %
Hasil	Tercapainya penangkapan ikan yang dilakukan nelayan di perairan laut	75 Unit, 1 Paket	75 Unit, 1 Paket	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



3. Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Ikan Perairan Umum Daratan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 792.430.000	Rp. 759.568.000	95,85 %
Keluaran	Terlaksananya Sarpas penangkapan ikan yang dilakukan nelayan di perairan umum	80 Unit Kelotok lengkap alat tangkap; 25 unit Kelotok Lantai Tinggi, 1 paket Kapal pengangkut ikan budidaya dan tangkap	80 Unit Kelotok lengkap alat tangkap; 25 unit Kelotok Lantai Tinggi, 1 paket Kapal pengangkut ikan budidaya dan tangkap	100 %
Hasil	Tercapainya penangkapan ikan yang dilakukan nelayan di perairan umum	80 Unit Kelotok lengkap alat tangkap; 25 unit Kelotok Lantai Tinggi, 1 paket Kapal pengangkut ikan budidaya dan tangkap	80 Unit Kelotok lengkap alat tangkap; 25 unit Kelotok Lantai Tinggi, 1 paket Kapal pengangkut ikan budidaya dan tangkap	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

4. Monitoring Evaluasi Sumberdaya Ikan, Perairan dan Kelembagaan Pengelolaan SDI

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 70.000.000	Rp. 69.852.000	99,79 %
Keluaran	Terlaksannya monitoring pemanfaatan dan pengelolaan SDI secara berkelanjutan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Hasil	Tersedianya Dokumen Analisis Pengelolaan SDI	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



5. Pembentukan Dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Perairan Umum Daratan dan Laut

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 55.013.000	Rp. 45.583.000	82,86 %
Keluaran	Jumlah Kelompok Pengelolaan SDI di PUD yang dibentuk (Provinsi Kalimantan Tengah)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Hasil	Meningkatnya Kelompok Pengelolaan SDI di PUD yang dibentuk (Provinsi Kalimantan Tengah)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

6. Pembinaan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 224.000.000	Rp. 222.223.400	99,21 %
Keluaran	Tersedianya perizinan perikanan tangkap yang dikelola dengan baik	2 Lokasi	2 Lokasi	100 %
Hasil	Meningkatnya ketaatan nelayan pemilik izin usaha perikanan tangkap	2 Lokasi	2 Lokasi	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



7. Pengembangan Habitat dan Perlindungan Sumberdaya Ikan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 180.000.000	Rp. 166.707.000	92,61 %
Keluaran	Terlaksannya Restocking Benih Ikan di Kawasan PUD	55.000 ekor	90.000 ekor	100 %
Hasil	Terlaksananya Pemulihan Stocking Ikan	3 Kawasan	3 Kawasan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

8. Pembangunan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsi Pelabuhan Perikanan (DAK)

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 9.641.826.000	Rp. 9.514.611.868,16	98,68 %
Keluaran	Jumlah pembangunan lanjutan PPI Kumai	1 Paket	1 Paket	100 %
Hasil	Tercapainya target produksi perikanan tangkap	151.276,50 Ton	151.276,50 Ton	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

9. Peningkatan Layanan Pelabuhan Perikanan Kumai

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 589.469.500	Rp. 581.581.400	98,66 %
Keluaran	Terlaksananya kegiatan operasioanl di PPI Kuala Jelai	12 Bulan	12 Bulan	100 %
Hasil	Meningkatnya pelayanan PPI Kumai dan Jelai: Produksi Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



10. Peningkatan Layanan Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 733.404.000	Rp. 723.259.877	98,62 %
Keluaran	Terlaksannya kegiatan operasional ddi PPI Kuala Pembuang dan PPI Ujung Pandaran	12 Bulan	12 Bulan	100 %
Hasil	Meningkatnya pelayanan PPI Kuala Pembuang dan PPI Ujung Pandaran; Produksi	12 Bulan	12 Bulan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

11. Peningkatan Tata Kelola Pelabuhan Perikanan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 733.404.000	Rp. 723.259.877	98,62 %
Keluaran	Terlaksananya kegiatan pelatihan diversifikasi usaha perikanan tangkap	7 Pelabuhan Perikanan	7 Pelabuhan Perikanan	100 %
Hasil	Meningkatnya kegiatan pelatihan diversifikasi usaha perikanan tangkap	7 Pelabuhan Perikanan	7 Pelabuhan Perikanan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



H. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, anggaran kegiatan pada program ini sampai akhir Desember 2019 telah terealisasi sebesar 96,25 % dengan realisasi fisik sebesar 100,00 %. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada program ini sampai dengan akhir Desember 2019 adalah sebagai berikut:

1. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 248.115.000	Rp. 246.805.000	97,92 %
Keluaran	Terlaksannya Kegiatan Gemarikan	500 Orang	500 Orang	100 %
Hasil	Tercapainya target AKI Kalteng	48,10 Kg/Kapita	48,10 Kg/Kapita	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

2. Pengembangan Usaha Pengolahan Perikanan Skala Kecil

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 423.695.000	Rp. 411.667.853,78	97,16 %
Keluaran	Tersalurkannya bantuan bagi unit pengolahan skala kecil	3 Kelompok	3 Kelompok	100 %
Hasil	Tingkat Konsumsi Ikan Kalteng	48,10 Kg/Kapita	48,10 Kg/Kapita	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



3. Pameran dan Promosi Produk Perikanan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 262.000.000	Rp. 252.187.400	96,25 %
Keluaran	Terlaksannya promosi dan sosialisasi produk kelautan dan perikanan	4 kali	4 kali	100 %
Hasil	Tercapainya target AKI Kalteng	48,10 Kg/Kapita	48,10 Kg/Kapita	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

4. Operasi Pasar

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 127.000.000	Rp. 115.059.500	90,59 %
Keluaran	Jumlah Ikan Segar yang terjual dalam rangka pengendalian inflasi	50.000 kg	50.000 kg	100 %
Hasil	Tercapainya target AKI Kalteng	48,10 Kg/Kapita	48,10 Kg/Kapita	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

b. Sertifikasi Kelayakan Pengolahan Bagi Unit Pengolahan Ikan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 100.000.000	Rp. 91.579.500	91,58 %
Keluaran	Jumlah Unit Pengolah yang bersertifikat	5 UPI	5 UPI	100 %
Hasil	Tercapainya target AKI Kalteng	48,10 Kg/Kapita	48,10 Kg/Kapita	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



I. Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pesisir

Program ini terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, anggaran kegiatan pada program ini sampai akhir Desember 2019 telah terealisasi sebesar 95,87 % dengan realisasi fisik sebesar 100,00 %. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada program ini pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penataan Kawasan Wilayah Pesisir

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 246.000.000	Rp. 244.375.800	99,34 %
Keluaran	Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir	1 Paket	1 Paket	100 %
Hasil	Jumlah Luasan Rehabilitasi Kawasan Pesisir	1 Ha	1 Ha	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

2. Penyusunan Dokumen Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 1.302.796.000	Rp. 1.227.922.200	94,25 %
Keluaran	Tersedianya Dokumen Perda Zonasi Wilayah Pesisir Kalteng	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Hasil	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



3. Rehabilitasi dan Ekstensifikasi Terumbu Karang

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 97.000.000	Rp. 95.722.800	98,68 %
Keluaran	Lestarnya Kawasan Konservasi Perairan Daerah Taman Wisata Perairan Senggora Sepagar dan Laut Sekitarnya	1 kawasan	1 kawasan	100 %
Hasil	Adanya kawasan Konservasi Perairan Daerah Taman Wisata	1 kawasan	1 kawasan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

4. Inventarisasi dan Identifikasi Kawasan Konservasi

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 20.000.000	Rp. 18.710.000	93,55 %
Keluaran	Jumlah Kabupaten Kawasan Konservasi Provinsi Kalteng	7 Kabupaten Pesisir	7 Kabupaten Pesisir	100 %
Hasil	Jumlah Kabupaten yang memiliki Kawasan Konservasi	7 Kabupaten Pesisir	7 Kabupaten Pesisir	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



5. Adopsi Teknologi dan Pembelajaran ke Lokasi Kawasan Konservasi Perairan Laut

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 84.436.200	Rp. 84.434.700	99,99 %
Keluaran	ASN dan Masyarakat Pesisir yang mengikuti Pembelajaran (Luar Provinsi)	1 paket	1 paket	100 %
Hasil	Jumlah ASN dan Masyarakat Pesisir yang mengikuti Pembelajaran (Luar Provinsi)	1 paket	1 paket	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

6. Pembinaan Kelompok Pengelola Kawasan Konservasi

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp37.563.800	Rp. 34.831.000	92,72 %
Keluaran	Tersedianya Kelompok Pengelolaan Kawasan Konservasi (Kabupaten Kotawaringin Barat)	4 Kelompok	4 Kelompok	100 %
Hasil	Jumlah Kelompok Pengelolaan Kawasan Konservasi (Kabupaten Kotawaringin Barat)	4 Kelompok	4 Kelompok	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



7. Identifikasi/Inventarisasi Potesi Limbah Hasil Perikanan Yang Dapat Dimanfaatkan Ulang di Kawasan Pesisir

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 100.000.000	Rp. 96.986.800	96,98 %
Keluaran	Tersedianya Kawasan Pesisir Yang Memiliki Potensi Limbah Hasil Perikanan Yang Dapat Dimanfaatkan Ulang	4 Kelompok	4 Kelompok	100 %
Hasil	Jumlah Kawasan Pesisir Yang Memiliki Potensi Limbah Hasil Perikanan Yang Dapat Dimanfaatkan Ulang	4 Kelompok	4 Kelompok	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

8. Adopsi Teknologi dan Pembelajaran ke Pengrajin/Komunitas Pengolah Limbah Hasil Perikanan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 64.316.400	Rp. 64.316.400	100 %
Keluaran	Terlaksananya ASN yang mengikuti pembelajaran (Luar Provinsi)	1 Paket	1 Paket	100 %
Hasil	Jumlah ASN yang mengikuti pembelajaran (Luar Provinsi)	1 Paket	1 Paket	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



9. Pembinaan Kelompok Wanita Pengolah Limbah Hasil Perikanan di Kawasan Wisata Ujung Pandaran

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 33.640.000	Rp. 33.640.000	100 %
Keluaran	Terbentuknya kelompok Pengolah Kerajinan Tangan (Kabupaten Kotawaringin Timur)	3 Kelompok	3 Kelompok	100 %
Hasil	Jumlah kelompok Pengolah Kerajinan Tangan (Kabupaten Kotawaringin Timur)	3 Kelompok	3 Kelompok	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

10. Koordinasi/Evaluasi/Pembinaan Terkait Pemanfaatan Ruang Laut dan Jasa Kelautan Dengan Stakeholder Terkait di Wilayah Pesisir

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 86.043.600	Rp. 77.813.800	90.43%
Keluaran	Stakeholder memahami dan dapat menjalankan peraturan – peraturan pemerintah terkait pemanfaatan ruang laut dan jasa kelautan	7 Kabupaten Pesisir	7 Kabupaten Pesisir	100 %
Hasil	Jumlah kelompok Pengolah Kerajinan Tangan (Kabupaten Kotawaringin Timur)	7 Kabupaten Pesisir	7 Kabupaten Pesisir	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



11. Gerakan Bersih Pantai dan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 76.000.000	Rp. 75.200.000	98.95%
Keluaran	Bertambahnya Luasan Kawasan Pesisir yang Terehabilitasi, masyarakat memahami pentingnya menjaga kelestarian Wilayah Pesisir	2 Kawasan	2 Kawasan	100 %
Hasil	Jumlah Luasan Kawasan Pesisir yang Terehabilitasi, masyarakat memahami pentingnya menjaga kelestarian Wilayah Pesisir	2 Kawasan	2 Kawasan	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

12. Penyusunan Rencana Pengelolaan Wisata Mangrove

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 175.148.000	Rp. 173.061.100	98.81%
Keluaran	Tersedianya Dokumen yang Dihasilkan Dalam Rangka Pengembangan Wisata Mangrove	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Hasil	Jumlah Dokumen yang Dihasilkan Dalam Rangka Pengembangan Wisata Mangrove	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



J. Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, anggaran kegiatan pada program ini sampai akhir Desember 2019 telah terealisasi sebesar 93,91 % dengan realisasi fisik sebesar 100,00 %. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada program ini pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Upaya Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 400.000.000	Rp. 362.131.000	90,53 %
Keluaran	Jumlah Operasi Pengawasan yang Dilaksanakan	4 Kali Operasi	4 Kali Operasi	100 %
Hasil	Persentase pelaku usaha yang patuh kepada peraturan	80 %; 40 Pokmaswas	80 %; 40 Pokmaswas	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

2. Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bisang Kelautan dan Perikanan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 102.150.000	Rp. 89.300.000	87,42 %
Keluaran	Jumlah Pertemuan Yang Dilaksanakan Dalam Rangka Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan	3 kali	3 kali	100 %
Hasil	Persentase pelaku usaha yang patuh kepada peraturan	80 %; 40 Pokmaswas	80 %; 40 Pokmaswas	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



3. Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 114.000.000	Rp. 113.455.435	99,52 %
Keluaran	Jumlah Perijinan Unit Pengolahan Ikan dan Perijinan Budidaya Yang Terawasi	6 UPI ; 25 Pokdakan	6 UPI ; 25 Pokdakan	100 %
Hasil	Persentasi pelaku usaha yang patuh kepada peraturan	80 %; 40 Pokmaswas	80 %; 40 Pokmaswas	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

4. Peningkatan Sarana Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 100.000.000	Rp. 92.570.321	92,57 %
Keluaran	Jumlah Pertemuan Yang Dilaksanakan Dalam Rangka Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan	1 Paket	1 Paket	100 %
Hasil	Persentasi pelaku usaha yang patuh kepada peraturan	80 %; 40 Pokmaswas	80 %; 40 Pokmaswas	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



5. Pemantauan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 220.000.000	Rp. 215.334.602	97,88 %
Keluaran	Jumlah Kapal dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir Yang Memenuhi Persyaratan Perijinan Serta Tingkat Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan	7 Kabupaten Pesisir	7 Kabupaten Pesisir	100 %
Hasil	Persentase pelaku usaha yang patuh kepada peraturan	80 %; 40 Pokmaswas	80 %; 40 Pokmaswas	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

6. Pembentukan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 105.000.000	Rp. 105.000.000	100 %
Keluaran	Perijinan Unit Pengolahan Ikan, Perijinan Budidaya dan Kawasan Tercemar	6 UPI, 15 Pokdakan dan 2 Kawasan Tercemar	6 UPI, 15 Pokdakan dan 2 Kawasan Tercemar	100 %
Hasil	Persentase pelaku usaha yang patuh kepada peraturan	80 %; 30 Pokmaswas	80 %; 30 Pokmaswas	100 %
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



K. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya ini terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, anggaran kegiatan pada program ini sampai akhir Desember 2018 telah terealisasi sebesar 94,07 % dengan realisasi fisik sebesar 100,00 %. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada program ini pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Gerakan Pakan Mandiri

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja (Rp.)	Realisasi	Presentase Capaian (%)
Masukan	Jumlah Dana	Rp169.936.400	Rp168.487.000	99,15
Keluaran	Tersedianya Pabrik Pakan Ikan Modern	1 Unit	1 Unit	100
Hasil	Terbangunnya Pabrik Pakan Ikan Modern	1 Unit	1 Unit	100
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

2. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Presentase Capaian (%)
Masukan	Jumlah Dana	Rp300.057.187	Rp284.688.500	94,88
Keluaran	Tersedianya Bantuan yang diberikan bagi kelompok pembudidaya di kawasan pesisir dan laut	3 Paket	3 Paket	100
Hasil	Bantuan yang diberikan bagi kelompok pembudidaya di kawasan pesisir dan laut	3 Paket	3 Paket	100
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Operasional UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Presentase Capaian (%)
Masukan	Jumlah Dana	Rp662.925.000	Rp639.434.200	96,46
Keluaran	Tersedianya Benih yang dihasilkan	1.000.000 Ekor	1.000.000 Ekor	100
Hasil	Jumlah Benih yang dihasilkan	1.000.000 Ekor	1.000.000 Ekor	100
Sasaran	UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran			

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Operasional UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Presentase Capaian (%)
Masukan	Jumlah Dana	Rp645.925.000	Rp629.449.200	97,45
Keluaran	Tersedianya Benih yang dihasilkan	30.000 Ekor	30.000 Ekor	100
Hasil	Jumlah Benih yang dihasilkan	30.000 Ekor	30.000 Ekor	100
Sasaran	UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai			



5. Pendataan dan Pembinaan Kelompok Pembudidaya di Kawasan Pesisir dan Laut

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Presentase Capaian (%)
Masukan	Jumlah Dana	Rp50.000.000	Rp47.343.000	94,69
Keluaran	Tersedianya Laporan hasil pendataan kelompok berbadan hukum dan pembinaan pengembangan usaha pembudidaya di kawasan pesisir	1 Laporan	1 Laporan	100
Hasil	Jumlah Laporan hasil pendataan kelompok berbadan hukum dan pembinaan pengembangan usaha pembudidaya di kawasan pesisir dan laut	1 Laporan	1 Laporan	100
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



6. Gerakan Pakan Mandiri di Kawasan Pesisir Laut

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Presentase Capaian (%)
Masukan	Jumlah Dana	Rp66.000.000	Rp62.740.000	95,06
Keluaran	Tersedianya Mesin Pakan Ikan Mini yang disalurkan di Kawasan Pesisir Laut	5 Paket	5 Paket	100
Hasil	Jumlah Mesin Pakan Ikan Mini yang disalurkan di Kawasan Pesisir Laut	5 Paket	5 Paket	100
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

7. Pembinaan dan Pendampingan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) di Kawasan Pesisir dan Laut

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Presentase Capaian (%)
Masukan	Jumlah Dana	Rp90.000.000	Rp83.570.000	92,86
Keluaran	Tersedianya Kelompok Perikanan Budidaya yang Terbina terkait Sertifikasi CBIB	5 Kelompok	5 Kelompok	100
Hasil	Jumlah Kelompok Perikanan Budidaya yang Terbina terkait Sertifikasi CBIB	5 Kelompok	5 Kelompok	100
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



8. Pengumpulan dan Pengelolaan Data Sasaran dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Presentase Capaian (%)
Masukan	Jumlah Dana	Rp50.000.000	Rp49.128.000	98,26
Keluaran	Tersusunnya Dokumen data dan realisasi produksi perikanan budidaya se-Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Hasil	Jumlah Dokumen data dan realisasi produksi perikanan budidaya se-Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

9. Pengembangan Budidaya di Kawasan Pesisir dan Laut

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Presentase Capaian (%)
Masukan	Jumlah Dana	Rp700.000.000	Rp685.804.000	97,97
Keluaran	Tersedianya KJA Laut, Benih dan Pakan	1 Paket	1 Paket	100
Hasil	Jumlah KJA Laut, Benih dan Pakan	1 Paket	1 Paket	100
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



**10. Koordinasi dan Monitoring ke UPTD/UPR/Pembudidaya
Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya di Kawasan
Pesisir Laut**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Presentase Capaian (%)
Masukan	Jumlah Dana	Rp100.000.000	Rp96.401.000	96,40
Keluaran	Tersedianya Laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan monitoring ke UPTD/UPR/Pe mbudidaya di Kawasan pesisir laut	1 Laporan	1 Laporan	100
Hasil	Laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan monitoring ke UPTD/UPR/Pe mbudidaya di Kawasan pesisir laut	1 Laporan	1 Laporan	100
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

11. Pengembangan Perikanan Budidaya

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Presentase Capaian (%)
Masukan	Jumlah Dana	Rp1.234.410.000	Rp122.510.184,28	99,25
Keluaran	Tersedianya sarana budidaya sistem bioflock di Kalimantan Tengah	1 Paket	1 Paket	100
Hasil	Sarana budidaya sistem bioflock di Kalimantan Tengah	1 Paket	1 Paket	100
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



12. Pendampingan dan Monev Bantuan Pemerintah

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Presentase Capaian (%)
Masukan	Jumlah Dana	Rp55.000.000	Rp51.699.000	94,00
Keluaran	Tersedianya Laporan Pendampingan dan Monev Bantuan Pemerintah	1 Paket	1 Paket	100
Hasil	Laporan Pendampingan dan Monev Bantuan Pemerintah	1 Paket	1 Paket	100
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

13. Pembinaan dan Bimbingan Teknis dan Pembekalan Kepada Kelompok Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI)

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Presentase Capaian (%)
Masukan	Jumlah Dana	Rp66.000.000	Rp66.000.000	100
Keluaran	Pembinaan GERPARI untuk kelompok yang memperoleh bantuan pemerintah dan bimbingan teknis pembuatan pakan ikan mandiri	3 Kabupaten; 30 Orang	3 Kabupaten; 30 Orang	100
Hasil	Terbinanya GERPARI untuk kelompok yang memperoleh bantuan pemerintah dan bimbingan teknis pembuatan pakan ikan mandiri	3 Kabupaten; 30 Orang	3 Kabupaten; 30 Orang	100
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



14. Pembinaan UPR/UPTDBBI Dalam Rangka Sertifikasi Cara Perbenihan Ikan Yang Baik (CBIB)

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Presentase Capaian (%)
Masukan	Jumlah Dana	Rp110.000.000	Rp84.195.900	76,54
Keluaran	Tersedianya Laporan Pembinaan ke UPTD/UPR/BBI yang Tsertifikasi CPIB	2 Laporan	2 Laporan	100
Hasil	Laporan Pembinaan ke UPTD/UPR/BBI yang Tsertifikasi CPIB	2 Laporan	2 Laporan	100
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			

15. Sosialisasi dan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Presentase Capaian (%)
Masukan	Jumlah Dana	Rp55.000.000	Rp49.118.400	89,31
Keluaran	Sosialisasi dan Pembinaan CBIB	2 Laporan	2 Laporan	100
Hasil	Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan CBIB	2 Laporan	2 Laporan	100
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



16. Pembinaan Perijinan Kapal Pengangkut Ikan Hasil Budidaya

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Presentase Capaian (%)
Masukan	Jumlah Dana	Rp40.000.000	Rp37.770.000	94,43
Keluaran	Tersedianya Data Kapal Pengangkut Ikan Hasil Budidaya di 14 Kab/Kota (Uk. 0-10 GT dan 10 GT)	1 Laporan	1 Laporan	100
Hasil	LaporanData Kapal Pengangkut Ikan Hasil Budidaya di 14 Kab/Kota (Uk. 0-10 GT dan 10 GT)	1 Laporan	1 Laporan	100
Sasaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah			



3.3. Pelaksanaan Kegiatan APBN

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui dana APBN (Dekonsentrasi/DK tahun 2019 sebanyak 6 (enam) Satuan Kerja (Satker), dengan rincian sebagai berikut :

3.3.1. Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (Satker – 01)

Kegiatan yang dilaksanakan pada Satker – 01 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (140097/DK) dengan nilai pagu Rp. 822.224.000,- dengan Realisasi Anggaran Rp. 804.205.094,- (97,81 %) dan Realisasi Fisik 100 % dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

❖ Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP.

1. Pengelolaan Keuangan KKP

Output :

- a. Layanan Manajemen Keuangan (1 Layanan)

Kegiatan :

- Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Anggaran, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN
 - Penatausahaan Laporan Keuangan

2. Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP

Output :

- a. Layanan Perencanaan (6 Layanan)

Kegiatan :

- Layanan Program, Anggaran, Monitoring dan Laporan Kegiatan APBN di Daerah, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Dukungan Penyelenggaraan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KP di Daerah.

3. Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP

Output :

- a. Layanan Data dan Informasi (1 Layanan)



Kegiatan :

- Data Statistik, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Pengolahan Data Statistik

3.3.2. Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (Satker-03)

Kegiatan yang dilaksanakan pada Satker – 03 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (149028/DK) dengan nilai pagu Rp. 490.577.000,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 405.577.000,- (82,72 %) dan Realisasi Fisik 100 % dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

❖ Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan

Out Put :

- a. Awak kapal perikanan yang bersertifikasi (30 orang)

Kegiatan :

- Sertifikasi Awak Kapal Perikanan di Daerah

2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Output :

- a. Pelabuhan Perikanan yang melaksanakan Kesyahbandaran (1 Lokasi)

Kegiatan :

- Pelaksanaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
- b. Pelabuhan Perikanan yang menerapkan Sistem Informasi dan Keterpaduan Pelabuhan Perikanan (1 Lokasi)

Kegiatan :

- Penyusunan Pedoman Penerapan Sistem Informasi dan Keterpaduan Pelabuhan Perikanan
- c. Pelabuhan Perikanan (termasuk dukungan untuk Sentra Perikanan Terpadu) yang teridentifikasi dan disiapkan pembangunannya (1 Lokasi).



Kegiatan :

- Identifikasi dokumen perencanaan pelabuhan perikanan (termasuk dukungan untuk sentra perikanan terpadu).

3. Pengendalian Penangkapan Ikan

Output :

- a. Sistem Perizinan Pusat Daerah yang Terintegrasi (1 Provinsi)

Kegiatan :

- Penyusunan Pedoman Pembinaan dan Integrasi Sistem Perizinan Pusat dan Daerah.

4. Pengelolaan Kenelayanan

Output :

- a. Nelayan yang terlindungi

Kegiatan :

- Identifikasi Calon Penerima Asuransi Nelayan

- b. Rumah Tangga Perikanan yang melakukan Diversifikasi Usaha (35 RTP)

Kegiatan :

- Identifikasi Keluarga Nelayan

- c. Kelembagaan Usaha Nelayan yang Meningkatkan Kapasitasnya (50 Kelompok)

Kegiatan :

- Identifikasi Kelembagaan Usaha Nelayan

- d. Sistem Informasi Kenelayanan yang Termanfaatkan (1 Lokasi)

Kegiatan :

- Penataan Basis Data Kenelayanan

5. Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Output :

- a. Data dan Statistik Perikanan Tangkap (1 Dokumen)

Kegiatan :

- Koordinasi, Validasi dan Finalisasi Data Statistik Perikanan Tangkap

- b. Perairan yang dipantau dan dievaluasi Pengelolaan Sumber Daya Ikannya (1 WPP)

Kegiatan :



- Penghitungan Alokasi Sumber Daya Ikan sebagai Rujukan Lokasi Penempatan Kapal Bantuan
- c. Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan yang Terkelola Sumber Daya Ikannya (1 WPP)
Kegiatan :
 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan
- d. Kapal Perikanan yang Menerapkan Logbook Penangkapan Ikan (10 Unit)
Kegiatan :
 - Workshop dan Rapat Teknis Data Logbook Penangkapan Ikan
- e. Kelembagaan Pengelolaan WPPNRI yang Terbentuk (1 Wilayah)
Kegiatan :
 - Pertemuan Kelembagaan Pengelolaan WPPNRI.

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap

Output :

- a. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (2 Layanan)
Kegiatan :
 - Layanan Perencanaan, Kerjasama, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan Program dan Anggaran Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
 - Layanan Keuangan, Umum, Persuratan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Barang Milik Negara, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan Administrasi Keuangan.

3.3.3. Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (Satker – 04)

Kegiatan yang dilaksanakan pada Satker – 04 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (149029/DK) dengan nilai pagu Rp. 498.000.000,- dengan Realisasi Anggaran Rp.408.976.600,- (82,12 %) dan



Realisasi Fisik sebesar 100%, dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

❖ **Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya**

1. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

Output :

- a. Kawasan Budidaya yang di Survailan dan atau di Monitoring Penyakit Ikannya (1 Kab/Kota)

Kegiatan :

- Kawasan Budidaya yang Penyakit Ikan Pentingnya dilakukan Survailan dan atau Monitoring Penyakit, dengan rincian kegiatan :
 - Perjalanan dalam rangka Survailan dan atau Monitoring Penyakit Ikan Penting di Kawasan Budidaya

- b. Kawasan Budidaya yang mendapat Penanganan Mutu Lingkungannya (2 Kab/Kota)

Kegiatan :

- Kawasan Budidaya yang mendapat Penanganan Mutu Lingkungannya, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Perjalanan dalam rangka Monitoring Lingkungan Budidaya.

2. Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan

Output :

- a. Produksi Benih yang dihasilkan UPT dan UPTD (4 juta ekor)

Kegiatan :

- Produksi Benih Ikan Air Tawar yang dihasilkan UPT dan UPTD, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Perjalanan Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Benih Ikan Air Tawar
- Produksi Benih Ikan Air Payau yang dihasilkan UPT dan UPTD, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Perjalanan Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Benih Ikan Air Payau.



3. Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya

Output :

- a. Kawasan Budidaya yang prasarananya mampu dioperasikan secara tepat guna (12 Kawasan)

Kegiatan :

- Kawasan Budidaya yang prasarananya mampu dioperasikan secara tepat guna, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Monitoring dan Evaluasi Kondisi Sarana Prasarana di Kawasan Perikanan Budidaya.

4. Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan

Output :

- a. Kelompok Masyarakat yang Tingkatkan Skala Usahanya (9 Kelompok)

Kegiatan :

- Pengembangan Usaha, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Perjalanan Dinas dalam Rangka Penyaluran
 - Forum Penguatan Kapasitas Usaha Perikanan Budidaya

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Output :

- a. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Kegiatan :

- Layanan Program, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan Program dan Anggaran
 - Layanan Evaluasi dan Pelaporan
- Layanan Keuangan dan Umum, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Layanan Keuangan
 - Pengelolaan Satker

6. Pengelolaan Pakan Ikan

Output :

- a. Jenis pakan ikan terdaftar



Kegiatan :

- Pakan Ikan Terdaftar, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - Pengawasan Mutu Pengadaan dan Peredaran/Penggunaan Bahan
- Peningkatan Produksi Pakan Ikan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Perjalanan Dinas Identifikasi, Supervisi, Monev Lokasi Pakan Mandiri.

3.3.4. Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (Satker – 05)

Kegiatan yang dilaksanakan pada Satker – 05 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (149030/DK) dengan nilai pagu Rp. 352.256.000,- dengan Realisasi Anggaran Rp.351.986.000,- (99,92 %) dan Realisasi Fisik sebesar 100%, dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

❖ Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

1. Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Output :

- Forum Koordinasi antar aparat penegak hukum yang terselenggara.
- Data dan informasi penanganan pelanggaran bidang perikanan yang akuntabel.

2. Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

Output :

- Laporan Inventarisasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan.

3. Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan

Output :

- Aparatur/Pejabat Fungsional yang mengikuti Peningkatan kemampuan Teknis Pengawasan Sumber Daya Perikanan.
- Kelompok Masyarakat pengawasan (POKMASWAS) yang berperan aktif Dalam Pengawasan SDKP.



4. Operasional Pemantauan Pemanfaatan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan

Output :

- Laporan Hasil Pemantauan dan Analisis Data Pemantauan SDKP.

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP

6. *Output :*

- Laporan Penatausahaan.
- Laporan Keuangan.
- Laporan SIMAK-BMN.
- Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.
- Laporan Kegiatan Pengawasan SDKP.

3.3.5. Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (Satker – 06)

Kegiatan yang dilaksanakan pada Satker – 06 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (149031/DK) dengan nilai pagu Rp. 182.041.000,- dengan Realisasi Anggaran Rp. 168.681.950,- (92,66 %) dan Realisasi Fisik 100% dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

❖ **Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

1. Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan

Output :

- a. Sarana dan Prasarana Logistik yang dibangun dan dimanfaatkan

Kegiatan :

- Sarana dan Prasarana Logistik yang dibangun dan dimanfaatkan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Pertemuan Koordinasi dalam rangka Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik dengan Instansi Logistik

2. Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan

Output :

- a. Lokasi Promosi dan Kerjasama Peningkatan Konsumsi Ikan yang dilaksanakan



Kegiatan :

- Lokasi Promosi Peningkatan Konsumsi Ikan dalam Negeri yang dilaksanakan Satker Daerah, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Pameran Hasil Kelautan dan Perikanan di dalam Negeri.

3. Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan

Output :

- a. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan

Kegiatan :

- Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan Satker Daerah, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Pelayanan SKP

4. Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan

Output :

- a. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Kelautan yang disusun dan Jumlah Standar Nasional Indonesia Produk Kelautan yang diterapkan

Kegiatan :

- Verifikasi Unit Penanganan Pengolahan Produk Kelautan Satker Daerah, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Pertemuan dalam rangka Verifikasi Unit Penanganan Pengolahan Produk Kelautan.

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSKP

Output :

- a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSKP pada Satker Daerah

Kegiatan :

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSKP pada Satker Daerah, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan Rencana Program dan Anggaran



3.3.6. Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (Satker – 07)

Kegiatan yang dilaksanakan pada Satker – 07 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (149032/DK) dengan nilai pagu Rp. 167.500.000,- dengan Realisasi Anggaran Rp. 146.303.800,- (87,35 %) dan Realisasi Fisik 100% dengan rincian program dan kegiatan adalah :

❖ Program Pengelolaan Ruang Laut

1. Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Output :

- a. Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan (1 Kawasan)

Kegiatan :

- Sosialisasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi

2. Perencanaan Ruang Laut

Output :

- a. Provinsi yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (1 Dokumen)

Kegiatan :

- Pendampingan Penyusunan RZWP3K

3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Output :

- a. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (2 Layanan)

Kegiatan :

- Layanan Perencanaan, Program dan Anggaran, Monitoring dan Evaluasi berdasarkan Data Terkini dan Akurat, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Perencanaan Program dan Anggaran Lingkup Ditjen PRL
 - Laporan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Ditjen PRL
- Layanan Keuangan, Pengelolaan BMN, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Serta Tata Usaha dan Rumah Tangga Lingkup Ditjen PRL, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Administrasi Keuangan Lingkup Ditjen PRL



Pelaksanaan kegiatan-kegiatan APBD maupun APBN saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang tepat guna sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai. Hal ini dapat dilakukan apabila didukung oleh semua pihak, mulai dari masyarakat hingga pengambil kebijakan.



Dalam kegiatan yang berlangsung selama 4 (empat) hari ini (29 April 2019 – 2 Mei 2019) melibatkan pelaku usaha dari kerajinan limbah pesisir dari Desa Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dengan mendapatkan hasil teradopsinya teknik dari beberapa produk yang nantinya mampu diolah di wilayah sesuai dengan kebutuhan dan bahan limbah yang tersedia di masing-masing wilayah.

9. Pembinaan Kelompok Wanita Pengolah Limbah Hasil Perikanan di Kawasan Wisata Ujung Pandaran.

Dalam rangka meningkatkan kreatifitas dan peran kelompok wanita pengolah limbah hasil perikanan yang dilaksanakan di kawasan wisata Desa Ujung Pandaran, Kabupaten Kotawaringin Timur maka dilaksanakan Pembinaan Kelompok Wanita Pengolah Limbah Hasil Perikanan di Kawasan Wisata Ujung Pandaran pada tanggal 1-3 Juli 2019. Kegiatan yang diikuti oleh 10 orang anggota “Kelompok Karya Pesisir” diperoleh hasil berupa pertemuan dengan anggota kelompok yang berkoordinasi dengan petugas dari Kantor Kecamatan di Desa Teluk Sampit yang menangani administrasi dan perlengkapan serta terfasilitasinya akses untuk kelompok melakukan pembuatan akta notaris berbadan hukum dalam menunjang korelasi fungsi peningkatan dan penguatan kelembagaan kelompok dalam melakukan usaha pengolahan limbah hasil perikanan di wilayah pesisir.

10. Koordinasi/Evaluasi/Pembinaan Terkait Pemanfaatan Ruang Laut dan Jasa Kelautan dengan Stakeholder Terkait di Wilayah Pesisir.

Pelaksanaan kegiatan ini berupa Sosialisasi Regulasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang bertujuan agar melalui kegiatan ini dapat tersosialisasinya Regulasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2019, serta memperkenalkan website : “Geoportal-Laut Berkah” milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2019 ini dihadiri oleh 25 orang peserta perwakilan dari Polairut Polda Kalteng; Dinas Perhubungan Prov. Kalteng; Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalteng; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalteng; Dinas Kehutanan Prov.



Kalteng; Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Prov. Kalteng; BAPPEDALITBANG Prov. Kalteng; Satpol PP Prov. Kalteng; Dinas Perikanan Kota Palangka Raya; Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Palangka Raya; UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai; UPT. Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang; UPT. Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai; Media Massa (Harian Umum TABENGAN dan LKBN Antara); Tenaga Ahli; serta Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pertemuan sosialisasi Peraturan Gubernur dan website : “Geoportal-Laut Berkah” terkait pemberian izin lokasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangan (0-12 mil laut di luar minyak dan gas).

11. Gerakan Bersih Pantai dan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 April 2019 di sepanjang pesisir Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tujuan untuk menciptakan suatu lingkungan yang bersih, indah dan sehat. Selain itu, dengan dilakukannya kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan semangat cinta lingkungan yang bersih, indah dan sehat terhadap ekosistem pesisir dan laut, secara umum di kalangan masyarakat pesisir, komunitas, organisasi serta instansi terkait di sekitar Kabupaten Kotawaringin Barat; juga meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya kebersihan pantai; serta menghijaukan dan menambah estetika keindahan pantai dengan menanam 200 pohon anakan mangrove di sepanjang pesisir Desa Kubu. Kegiatan ini diikuti oleh 271 peserta perwakilan dari Dinas Perikanan Kab. Kobar; Dinas Perhubungan Kab. Kobar; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kobar; Badan Penanggulangan Bencana Kab. Kobar; Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kobar; Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kobar; kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kumai; UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai; UPT. Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai; Kecamatan Kumai; Masyarakat Desa Kubu; POKMASWAS Desa Kubu; Universitas Antakusuma Pangkalan Bun; dan WWF Kab. Kobar. Dalam kegiatan ini semua peserta melakukan pemungutan sampah dan menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di



pantai serta melakukan penanaman pohon mangrove bersama-sama secara simbolis.

12. Penyusunan Rencana Pengelolaan Wisata Mangrove.

Dalam kegiatan penyusunan rencana pengelolaan wisata mangrove ini, tim dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan studi banding tentang pengelolaan wisata mangrove ke Provinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk menggali informasi tentang tata kelola wisata mangrove. Setelah melakukan pertemuan dan koordinasi dengan tim dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, tim bersama-sama mengunjungi lokasi wisata mangrove di Desa Wonorejo dan Desa Clungup Kabupaten Malang. Pada kawasan wisata mangrove Wonorejo pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat sekitar, sedangkan pada kawasan wisata mangrove Clungup pengelolaannya dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat setempat. Dalam pengelolaannya, pada kedua kawasan ini sama-sama mengutamakan kelestarian mangrove agar selalu terjaga melalui penanaman untuk menjaga ekosistem perairan wilayah pesisir dan juga untuk meningkatkan perekonomian khususnya masyarakat pesisir di area kawasan wisata mangrove ini. Dari hasil studi banding ini diharapkan kedepannya dapat diterapkan di Kalimantan Tengah, khususnya di kawasan wisata mangrove Desa Ujung Pandaran Kabupaten Kotawaringin Timur.

4.5. Unit Pelaksana Teknis

4.5.1. UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai Kalimantan Tengah

Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai Kalimantan Tengah, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang perikanan budidaya air payau yang dilaksanakan pada UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan administrasi perkantoran;
2. Pembersihan lingkungan kerja;



3. Pelayanan umum terkait layanan informasi kepada masyarakat tentang UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai;
4. Pengadministrasian aset negara dan daerah agar dapat tersedia data yang akurat;
5. Penyediaan data dan informasi terkait aktivitas UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai, terutama tentang jenis budidaya yang tersedia; dan
6. Pemeliharaan benih ikan dan indukan.

Beberapa kendala yang dihadapi UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di tahun 2019 antara lain :

1. Kurangnya ASN dan SDM pada UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai;
2. Minimnya sarana dan prasarana penunjang kinerja perkantoran di UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai; dan
3. Kurangnya data aset sebagai acuan pencatatan aset.

Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut diatas maka dalam menghadapi permasalahan tersebut UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai telah memaksimalkan sumberdaya yang ada sehingga semua kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik serta perlu adanya dukungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

4.6.2. UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran Kalimantan Tengah

Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran Kalimantan Tengah, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa.

Pada tahun 2019, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran adalah sebagai berikut:



1. Kegiatan administrasi kepegawaian, keuangan, maupun administrasi kegiatan teknis yang berjalan selama 1 (satu) tahun;
2. Kegiatan produksi, sebanyak 1.900.000 ekor benur udang windu PL 9 dan 9.000 ekor nener ikan bandeng;
3. Kegiatan pembinaan pembudidaya tambak udang, dengan melakukan jasa konsultasi teknis maupun kunjungan lapangan bagi petambak di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan;
4. Kegiatan pembenahan fasilitas-fasilitas penunjang budidaya yang ada di UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran, seperti penambalan dan pengecatan bak larva, penggantian atap fiberglass indoor hatchery, pemasangan atap fiberglass tempat kultur plankton, pembuatan jaringan instalasi air laut dan air tawar, perbaikan bak penampung air laut, dan perbaikan serta pengecatan bak treatment air laut.
5. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur, dengan melakukan konsultasi maupun koordinasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah serta Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan..

Beberapa kendala yang dihadapi UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di tahun 2019 antara lain :

1. Kondisi bak larva yang sudah tidak layak operasi;
2. Keterbatasan sarana pokok dan sarana pendukung produksi;
3. Daya listrik dari PLN yang tidak mencukupi untuk kegiatan operasional;
4. Sulitnya mendapatkan sinyal/koneksi dari jaringan telepon seluler; dan
5. Tidak adanya kendaraan operasional lapangan.

Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut diatas maka dalam menghadapi permasalahan tersebut UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran telah memaksimalkan sumberdaya yang ada sehingga semua kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik serta perlu adanya dukungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.



4.6.3. UPT Pelabuhan Perikanan Kumai Kalimantan Tengah

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Kumai Kalimantan Tengah, mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha.

Pada tahun 2019, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada UPT Pelabuhan Perikanan Kumai adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan rutin dan operasional kantor, terkait administrasi dan pelayanan umum;
2. Pelayanan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
3. Pemantauan aktivitas tambat-labuh dan bongkar-muat kapal perikanan;
4. Pemantauan layanan usaha;
5. Pertemuan koordinasi lintas instansi mitra;
6. Pertemuan pembinaan masyarakat nelayan dan pengolah ikan; dan
7. Fasilitasi pelaksanaan Gerai Perijinan.

Dari beberapa kegiatan yang telah terlaksana tersebut, beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah personil yang ada di UPT Pelabuhan Perikanan Kumai;
2. Belum tersedianya infrastruktur penunjang Pelabuhan Perikanan Kumai; dan
3. Aktivitas kesyahbandaran perikanan belum optimal karena belum tersedianya “Syahbandar Perikanan” di Kalimantan Tengah sebagai personil yang berwenang menerbitkan dokumen kesyahbandaran perikanan.

Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut diatas maka dalam menghadapi permasalahan tersebut UPT Pelabuhan Perikanan Kumai telah memaksimalkan sumberdaya yang ada sehingga semua kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik serta perlu adanya dukungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.



4.6.4. UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang Kalimantan Tengah

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang Kalimantan Tengah, mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha.

Pada tahun 2019, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan rutin dan administrasi kantor; terkait kebersihan kantor maupun fasilitas lainnya, administrasi kepegawaian, pengadministrasian barang milik negara/daerah, surat-menyurat, dan pelayanan umum lainnya;
2. Penyediaan data dan informasi terkait aktivitas Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang, terutama produksi pendaratan hasil tangkapan, pabrik es, dan penggunaan BBM pada SPDN (Solar Pack Dealer Nelayan);
3. Pelayanan kesyahbandaran pelabuhan perikanan dengan melaksanakan pengadministrasian pelaporan keberangkatan-kedatangan kapal perikanan, layanan tambat-labuh, keterangan asal ikan;
4. Pemantauan aktivitas tambat-labuh dan bongkar-muat kapal perikanan sehingga aktivitas tambat-labuh dan bongkar-muat oleh kapal perikanan dapat termonitor dan berjalan dengan lancar;
5. Pemantauan layanan usaha dan tata kelola yang dilaksanakan dengan tersedianya layanan usaha pelabuhan perikanan (SPDN, pabrik es, *coldstorage*, kios, dll) dan tata kelola yang mampu melayani nelayan, pengolah ikan, dan masyarakat umum di Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang;
6. Pertemuan koordinasi lintas instansi mitra dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan melibatkan mitra kerja, yaitu POLAIR, TNI AL, KSOP, Aparat Desa, dan Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan;
7. Pertemuan pembinaan masyarakat nelayan dan pengolah ikan dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi pelayanan Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang dan pelaksanaan peraturan yang berlaku;



8. Fasilitasi pelaksanaan Gerai Perijinan yang dilaksanakan oleh Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dan bekerja sama dengan UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang sehingga dapat terlaksananya Gerai Perijinan Perikanan Tangkap di Kuala Pembuang;
9. Pengadaan sarana kebutuhan nelayan dan pengolah hasil perikanan berupa *coolbox*, timbangan elektrik, gerobak dan keranjang;
10. Pengadaan sarana keselamatan nelayan berupa pelampung dan baju keselamatan (*life jacket*);
11. Pengadaan sarana kebutuhan pelabuhan yang dapat membantu dalam aktivitas sehari-hari pelabuhan dan pengolahan pasca-panen hasil tangkapan; dan
12. Pengadaan sarana kebutuhan rumah dinas dilaksanakan dalam rangka operasional penggunaan rumah dinas bagi aparatur di UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang dengan melengkapi dan mengisi rumah dinas berupa meubelair, elektronik, dapur, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan kegiatan di UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang pada tahun 2019, terdapat beberapa permasalahan/kendala yaitu :

1. Keterbatasan jumlah personil yang ada di UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang yang mengakibatkan waktu dan luasan layanan tidak dapat dilakukan secara optimal selama 24 jam;
2. Belum adanya dokumen/daftar lengkap barang milik negara/daerah yang dapat menjadi acuan bagi petugas dalam menyusun daftar barang yang sebenarnya yang terdapat di lapangan;
3. Belum terkoneksi UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang pada website PIPP (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pelabuhan Perikanan KKP RI dikarenakan belum tersedianya infrastruktur penunjang konektivitas tersebut serta aktivitas kesyahbandaran perikanan yang belum optimal;
4. Belum tersedianya “Syahbandar Perikanan” di Kalimantan Tengah sebagai personil yang berwenang menerbitkan dokumen kesyahbandaran perikanan; dan



5. Masih adanya sarana UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang yang sangat membutuhkan rehabilitasi.

Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut diatas maka dalam menghadapi permasalahan tersebut UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang telah memaksimalkan sumberdaya yang ada sehingga semua kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik serta perlu adanya dukungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.



BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

5.1. Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam mengelola hasil kelautan dan perikanan yang ada;
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan di sektor kelautan dan perikanan, terutama di Unit Pelaksana Teknis Dinas;
3. Masih tradisionalnya sistem dan alat tangkap yang digunakan nelayan dengan usaha berskala kecil;
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengawasan dan biaya operasional penyidik perikanan dalam menangani kasus *illegal fishing*;
5. Masih kurangnya modal usaha bagi pembudidaya ikan dan UPI Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terutama bagi pembudidaya ikan maupun UPI skala kecil; dan
6. Kurangnya pemahaman pembudidaya ikan tentang cara budidaya ikan yang baik (CBIB).

5.2. Upaya Pemecahan Masalah

Dalam mengantisipasi permasalahan tersebut di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan upaya sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM masyarakat perikanan baik secara kuantitas maupun kualitas;
2. Melakukan perbaikan/rehab sarana dan prasarana yang ada dan pembangunan sarana dan prasarana teknis yang baru sehingga dapat meningkatkan produksi kelautan dan perikanan;



3. Memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap dengan memberikan bantuan sarana penangkapan ikan kepada nelayan baik berupa kapal maupun alat tangkapnya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha penangkapannya;
4. Memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan melakukan kegiatan operasional pengawasan baik secara rutin maupun berkala dan melengkapi sarana dan prasarana pengawasan, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menanggulangi pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan; dan
5. Mencarikan peluang-peluang akses modal usaha bagi pembudidaya ikan dan UPI Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berupa bantuan modal dan bantuan sarana produksi maupun kegiatan-kegiatan temu usaha yang juga melibatkan pihak perbankan; dan
6. Melakukan pembinaan dan penilaian cara budidaya ikan yang baik (CBIB) kepada pembudidaya ikan.



BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

1. Anggaran biaya yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 adalah sebesar Rp 42.835.233.024,- yang terdiri dari APBD sebesar Rp 40.322.635.024,- dan APBN sebesar Rp 2.512.598.000,-.
2. Dana APBD terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp 28.293.114.770,- dengan realisasi Rp 27.564.448.215,22 (97,42 %) yang digunakan untuk 12 program kegiatan, dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 12.029.520.254,- dengan realisasi Rp 10.008.997.845,- (83,20 %) yang digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah serta Tambahan Penghasilan PNS.
3. Dana APBN sebesar Rp Rp 2.512.598.000,- telah terealisasi sebesar Rp 2.285.976.744,- atau 90,98 % yang bersumber dari dana Dekonsentrasi (DK).
4. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan pendanaan berasal dari APBD maupun APBN tidak mengalami hambatan yang berarti dan telah terealisasi secara fisik sebesar 100,00 % .

6.2. Saran

Laporan Tahunan ini disusun sebagai sarana informasi serta bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019. Oleh karena itu, diharapkan dari penyusunan Laporan Tahunan ini dapat menjadi bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 sehingga dapat menjadi acuan rencana kerja di masa mendatang dan meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan selanjutnya.